PERAN H. JUNUS JAHJA DALAM PROSES ASIMILASI ANTARA ETNIS TIONGHOA DAN PRIBUMI DI JAWA (1960-2011)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)

Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Oleh:

RIA ANDRIANI

NIM. A72214074

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ria Andriani

NIM : A72214074

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Fakultas : Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 27 Desember 2017

Saya yang menyatakan,

RIA ANDRIANI

A72214074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ria Andriani ini telah diperiksa

dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 03 Januari 2018

Pembimbing

Drs. M.H. Ridwan, M.Ag.

NIP. 195907171987031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji oleh Tim Penguji dan dinyatakan Lulus

Pada tanggal 30 Januari 2018

Ketua/Pembimbing

Drs. M.H. Ridwan, M.Ag.

NIP. 195907171987031001

Penguji I

Drs. H.Abdul Aziz Medan, M.Ag.

NIP.195509041985031001

Penguji II

Dr. H. Ahmad Zuhdi. Dh, M. Fil.I.

NIP. 196110111991031001

Sekretaris

H. Ali Muhdi,M.Si

NIP. 197206262007101005

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

Dr.H. Imam Ghazali Said, MA

NIP. 196002121990031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ria Andriani
NIM : A72219074
Fakultas/Jurusan : Adab Dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam
E-mail address : riaandri715@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERAN H. JUNUS JAHJA DALAM PROSES ASIMILASI ANTARA ETNIS TIONGHOA DAN PRIBUMI DI JAWA (1960-2011)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah sayaini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari 2018

Penulis

(Ria Andriani)
namaterangdantandatangan

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Peran H.Junus Jahja Dalam Proses Asimilasi Antara Etnis Tionghoa dan Pribumi di Jawa Tahun 1960-2011. Adapun masalah yang akan dibahas pada skripsi ini sebagai berikut: 1). Bagaimana Riwayat Hidup H.Junus Jahja? 2). Bagaimana Perkembangan Asimilasi yang terjadi antara etnis Tionghoa dan Pribumi di Jawa (1960-2011)? 3). Bagaimana kontribusi H. Junus Jahja dalam proses asimilasi antara etnis Tionghoa dan pribumi di Jawa (1960-2011)?.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode sejarah, metode ini menggunakan empat tahap penelitian yaitu, Heuristik (Pengumpulan sumber), Verifikasi (Kritik Sumber), Interpretasi (Penafsiran Sumber), dan Historiografi (Penulisan Sejarah). Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan sejarah riwayat hidup Junus Jahja dan kontribusinya dalam perkembangan asimilasi pada etnis Tionghoa di Jawa dan pendekatan sosiologis digunakan untuk menjelaskan kondisi masyarakat etnis Tionghoa di Jawa. Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori peranan dan teori Fungsionalisme struktural. Dengan kedua teori ini penulis berharap akan dapat menjelaskan bahwa H.Junus Jahja memiliki fungsi dan peran yang dominan dalam proses asimilasi pada etnis Tionghoa di Jawa.

Dengan rumusan masalah yang ada serta dari beberapa penelusuran yang penulis lakukan dari sumber-sumber primer dan sekunder, membuktikan bahwa 1). Junus Jahja merupakan seorang keturunan Tionghoa peranakan yang lahir di Jatinegara, Jakarta pada 22 April 1927 dengan nama Lauw Chuan Tho. Beliau merupakan lulusan dari Universitas *Nederlandse Economische Hogeschool* (NEH), Rotterdam Belanda. Junus pernah menjabat sebagai anggota pengurus MUI, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dan mendirikan beberapa organisasi. Junus meninggal pada 7 November 2011 karena sesak nafas. 2). Dalam perkembangannya proses asimilasi sebelum masa kemerdekaan telah dilakukan oleh Partai Tionghoa Indonesia, setelah kemerdekaan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tujuannya untuk mempercepat proses asimilasi misalnya seperti kebijakan tentang Dwi Kewarganegaraan, Kebijakan mengenai Ganti nama, kebijakan mengenai tentang agama, kepercayaan dan adat Istiadat Tionghoa serta mendirikan suatu organisasi seperti LPKB dan Bakom PKB untuk membantu proses asimilasi. Selain pemerintah dari pihak etnis Tionghoa sendiri juga membuat suatu Stetemen menuju Asimilasi yang kemudian melahirkan Piagam Asimilasi. 3). Kontribusi H.Junus Jahja dapat dilihat dari usaha-usaha beliau dalam mendirikan dan mengembangkan beberapa organisasi seperti turut dalam mengembangkan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia d/h Pembina Iman Tauhid Indonesia, mendirikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah dan Mendirikan Yayasan Haji Karim Oei.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

This thesis examines the role of H.Junus Jahja in the process of assimilation between ethnic Chinese and Indigenous in Java Year 1960-2011. The problem will be discussed in this thesis as follows: 1). How is H. Junus Jahja Biografy? 2).What is the Development of Assimilation between ethnic Chinese and Indigenous in Java (1960-2011)? 3). How does H. Junus Jahja contribution in the process of assimilation between ethnic Chinese and indigenous in Java (1960-2011)?

To be able answer the problem, the author uses historical method, this method uses four steps of research that is, Heuristik (sources collection), Verification (Source Critique), Interpretation (Interpretation of Resources), and Historiography (Historical Writing). This study uses a historical and sociological approach. The historical approach is used by the researcher to explain the history of Junus Jahja's history and his contribution in the development of assimilation on ethnic Chinese in Java and the sociological approach used to explain the condition of ethnic Chinese in Java. The theory used in this thesis is the theory of role and theory of structural Functionalism. With these two theories the authors hope to be able to explain that H.Junus Jahja has a dominant role and function in the assimilation process of ethnic Chinese in Java.

With the formulation of existing problem and some search that the author did from primary and scondary sources, to prove that 1). Junus Jahja born in Jatinegara, Jakarta on April 22, 1927 with the name Lauw Chuan Tho. He is a graduate of the University of *Nederlandse Economische Hogeschool* (NEH), Rotterdam Netherlands. Junus was a member of MUI's board, became a member of the Supreme Advisory Council and established several organizations. Junus died on November 7, 2011 because shortness of breath. 2). In its development, the pre-independence assimilation process was carried out by the Indonesian Tionghoa Party, after the independence of the government issued a policy aimed at accelerating the assimilation process such as the Policy on Citizenship, the Renaming Policy, the policy on religion, beliefs and customs of Chinese Istiadate and establishing a organizations such as LPKB and Bakom PKB to assist in the assimilation process. In addition to the Chinese ethnic government itself also made a Stake to Assimilation which later gave birth to the Assimilation Charter. 3). H.Junus Jahja's contribution can be seen from his efforts in establishing and developing several organizations such as participating in Persatuan Islam Tionghoa Indonesia d / h Pembina Iman Tauhid Indonesia, establishing Yayasan Ukhuwah Islamiyah and Establishing Yayasan Haji Abdul Karim Oei.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN …….. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING …… iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI ……. iv

MOTTO …… v

PERSEMBAHAN …… vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ……. vii

ABSTRAK ……... viii

KATA PENGANTAR ……. x

DAFTAR ISI …… xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……. 1

B. Rumusan Masalah …… 12

C. Tujuan Penelitian ……. 12

D. Kegunaaan Penelitian ……... 12

E. Pendekatan dan Kerangka Teori …….. 13

F. Penelitian Terdahulu ……. 16

G. Metode Penelitian ……. 20

H. Sistematika Pembahasan …….. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II BIOGRAFI H. JUNUS JAHJA (1927-2011)

A. Latar Belakang Keluarga H. Junus Jahja ……. 29

B. Pendidikan H. Junus Jahja ……... 35

C. Karir dan Karya-Karya H. Junus Jahja …… 38

BAB III PERKEMBANGAN ASIMILASI ANTARA ETNIS TIONGHOA DAN PRIBUMI DI JAWA (1960-2011)

A. Kondisi Etnis Tionghoa Di Jawa Pertengahan Abad 20 ……. 50

B. Diskursus Asimilasi Etnis Tionghoa Di Jawa …… 62

C. Tokoh-Tokoh Penggagas Asimilasi …… 75

BAB IV KONTRIBUSI H. JUNUS JAHJA DALAM PROSES ASIMILASI ANTARA ETNIS TIONGHOA DAN PRIBUMI DI JAWA TAHUN 1960-2011

A. Gagasan Konsep Asimilasi H.Junus Jahja ……. 82

B. Terbentuknya Piagam Asimilasi …… 88

C. Usaha-Usaha H. Junus Jahja Demi Tercapainya Asimilasi Etnis Tionghoa Di Jawa Tahun 1960-2011 …… 93

1. Mengembangkan Pesatuan Islam Tionghoa Indonesia d/h Pembina Iman Tauhid Indonesia (PITI) ……. 94

2. Mendirikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah …… 100

3. Mendirikan Yayasan Haji Abdul Karim Oei ……..... 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan……..... 110

B. Saran……..... 111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lauw Chuan Tho atau lebih dikenal dengan H. Junus Jahja merupakan seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam proses pembauran (asimilasi) antara etnis Tionghoa dan Pribumi di Jawa. Ia merupakan seorang dari golongan etnis Tionghoa Peranakan yang memiliki perhatian khusus terhadap kondisi dan nasib etnis Cina. H.Junus Jahja memiliki kontribusi yang besar dalam menggagas konsep asimilasi bersama beberapa cendekiawan Tionghoa. Proses asimilasi dilakukan dalam berbagai bidang seperti politik, budaya, ekonomi dan juga agama. Menurut H. Junus Jahja proses asimilasi antar etnis Tionghoa dan Pribumi di Jawa dapat dilakukan melalui jalur agama yaitu mengikuti agama penduduk mayoritas (Islam).

Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia, khusunya Jawa dengan berbagai perannya kurang diterima dengan baik oleh masyarakat pribumi sehingga mengakibatkan hubungan diantara keduanya tidak terjalin dengan baik.[1] Pada masa kekuasaan Belanda di Indonesia, orang-orang Tionghoa banyak memperoleh peranan untuk hal-hal yang tidak mampu di laksanakan oleh orang-orang Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda menempatkan orang-orang Tionghoa

[1]Siska Yulia Nurda, "Peranan KH Abdurrahman Wahid Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa Di Indonesia", http://repository.unej.ac.id, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) setelah golongan pertama yaitu golongan Eropa dan golongan ketiga (*inlanders*) yaitu orang-orang pribumi. Tiga golongan ini memiliki hak-hak yang berbeda. Umumnya orang Belanda menginginkan terputusnya jalur asimilasi yang dibangun oleh orang Tionghoa dengan Pribumi. Selain itu Belanda juga memisahkan perkampungan orang-orang Tionghoa dengan golongan Eropa dan golongan pribumi. Dari kebijakan politik penjajah yang melakukan politik memecah belah (*devide et impera*) menimbulkan kecemburuan sosial antara golongan pribumi dan Tionghoa. [2]

Pada masa pra-kemerdekaan etnis Tionghoa secara sosial menempati posisi yang lebih baik dari pada etnis pribumi.[3] Usaha-usaha untuk membaurkan etnis Tionghoa ke dalam masyarakat Pribumi memang telah dilakukan oleh pemerintah. Sejak tahun 1932 sampai 1967 asimilasi dibidang politik sangat giat di laksanakan, seperti didirikannya Partai Tinghoa Indonesia (1932), untuk membantu Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. PTI (Partai Tionghoa Indonesia) dipelopori oleh Liem Koen Hian dengan harapan etnis Tionghoa akan dapat menjadi warga negara Indonesia di Republik Indonesia. Pada masa Soekarno, warga Tionghoa harus memilih kewarganegaraannya, yaitu Republik Rakyat China atau Indonesia.

[2] Fahmi Rafika, "Integrasi Sosial Muslim Tionghoa", dalam *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Volume 9,No.2,Juli 2015, 106.
[3] Suhardi Ruman "Tionghoa: Warga Negara Indonesia" dalam *Sinergi, Edisi Ke-20/Tahun II/Juni 2000*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1952 pemerintah mengeluarkan kebijakan dwi kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing. Pada masa Demokrasi Liberal pemerintah juga menganjurkan etnis Tionghoa untuk mengganti namanya menjadi nama-nama Indonesia. Akan tetapi, usaha-usaha ini ternyata belum bisa memecahkan masalah di kalangan etnis Tionghoa secara total.[4]

Sejak Indonesia merdeka, etnis Tionghoa dianggap selalu menimbulkan masalah bagi Indonesia, termasuk juga di Jawa tetapi masalahnya tidak selalu sama. Awalnya mereka dianggap pro-Belanda dan anti nasionalisme Indonesia, kemudian dianggap eksklusif dan kerjanya hanya mencari keuntungan di kalangan pribumi, dan mereka dianggap komunis atau simpatisan komunis. Etnis Tionghoa juga dianggap sebagai kapitalis dan konglomerat yang mengeruk kekayaan negara tanpa patriotisme. Presepsi yang selalu negatif ini masih melekat pada golongan etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya Jawa.[5] Terlebih ketika pada masa Orde baru, Pemerintahan yang dipimpin Soeharto sangat membenci keberadaan etnis ini. Mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam segala hal kecuali dalam bidang perekonomian.

Masalah yang terjadi pada etnis Tionghoa memang belum dapat terselesaikan. Hal ini karena orang-orang Tionghoa belum berbaur sepenuhnya menjadi pribumi sehingga mereka tidak bisa diterima sebagai orang Indonesia. Indonesia sebagai negara majemuk -

[4] Ibid., 20.
[5] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja: Pribumi Kuat Kunci Pembauran* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bhinneka Tunggal Ika- berbeda-beda tetapi tetap satu, tetapi slogan ini hanya diterapkan pada pribumi, tidak pada minoritas Tionghoa. Pada masa pemerintahan Soekarno, masalah Tionghoa pernah diselesaikan yaitu dengan dicetuskannya konsep "suku peranakan Tionghoa". Namun, konsep ini tidak berhasil dan telah ditinggalkan pada zaman Orde baru. Asimilasi total merupakan tujuan dari pemerintah Presiden Soeharto. Dalam perjalannannya kebijaksanaan Orde Baru tidak semuanya konsisten. Memang, sistem peraturan ganti nama telah dilaksanakan dan tujuannya membaurkan etnis Tionghoa ke dalam tubuh masyarakat Indonesia Pribumi tetapi pemerintah masih saja membeda-bedakan warga negaranya berdasarkan keturunan.[6]

Dalam pandangan orang Pribumi, selama orang Tionghoa masih belum terasimilasi secara total maka masalah Tionghoa akan tetap ada. Misalnya, kerusuhan yang berbau SARA masih saja terjadi. Puncak dari kerusuhan ini sebetulnya terletak pada kesenjangan sosial antara pri dan non-pri.[7] Jadi untuk memecahkan masalah yang terkait dengan etnis Tionghoa, salah satu tokoh yaitu H. Junus Jahja menganjurkan gagasan bahwa dengan memeluk agama penduduk mayoritas maka terbaurlah etnis Tionghoa ke dalam tubuh pribumi dan masalah Tionghoa akan tuntas.

[6] Ibid., 83
[7] Wahono, *70 Tahun* Junus Jahja, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H.Junus Jahja (Lauw Chuan Tho) dilahirkan pada 22 April 1927 di Jatinegara, Jakarta.[8] Pada tahun 1948, ia meneruskan pendidikan formalnya, MULO –Belanda di Jakarta dan lulus AMS (*Algemene Midelbare School*, kini SMA) pada tahun 1949. Kemudian Junus Jahja bertolak ke Belanda dan belajar Ekonomi di salah satu Universitas bergengsi yaitu *Nederlandse Economische Hogeschool* (NEH), Rotterdam dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di awal tahun 1959.[9] Ketika menjadi mahasiswa di Belanda, Junus Jahja sering menulis di surat kabar *Star Weekly* tentang pandangannya terhadap penyelesaian masalah etnis Tionghoa di Indonesia. Ia mengganti namanya menjadi Junus Jahja pada tahun 1962. Junus Jahja merupakan seorang Protestan, kemudian ia masuk agama Islam pada 23 Juni 1979 di bawah bimbingan Buya Hamka. Ketertarikannya terhadap Islam sebenarnya sudah ada dalam hatinya sejak ia menjadi mahasiswa di Belanda, tetapi beliau baru mendapatkan hidayah pada tahun 1979. [10]

Pada tahun 1959 Junus Jahja pulang ke Indonesia. Kemudian Junus Jahja bekerja sebagai pegawai negeri di Departemen Pertanian dan ditempatkan di perusahaan Negara P.T.UPPI (Usaha Pengembangan Perikanan Indonesia). Anggaran perusahaan yang minim membut Junus berhijrah ke dunia perbankan milik pemerintah (kini Bank Ekspor Impor Pemerintah). Akan tetapi, di satu sisi ia semakin tertarik pada "masalah Cina" dari pada menekuni masalah-

[8] Ibid., 191.
[9] Ibid., 193-194.
[10]Junus Jahja, *Islam Di Mata WNI* (Jakarta: Yayasan Haji Karim Oei, 1993), 57-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah *finek* (finansial ekonomi). Hal ini mengakibatkan karir Junus Jahja beralih dari satu bidang ke bidang lainnya.[11] Ia juga diangkat sebagai anggota pengurus Majelis Ulama' Indonesia setelah setahun masuk Islam yaitu pada 1980.

Sewaktu Junus Jahja masih menempuh pendidikan di Belanda sekitar tahun 1950-an dengan beberapa teman dari Indonesia yang tergabung dalam Chung Hua Hui (perkumpulan khusus keturunan Cina di Nederland) mencetuskan ide asimilasi (menurut Junus sebutan tersebut tentunya belum lazim pada waktu itu). Prinsip ini menganjurkan dan melaksanakan pergaulan campur pri-nonpri secara intensif dan melembaga.[12] Junus dan beberapa temannya mulai menolak pergaulan atau cara berhimpun berdasarkan etnisitas, persamaan ras dan ikatan darah seperti perkumpulan Chung Hua Hui (CHH). Yang ia cita-citakan ialah berdasar ke-Indonesia-an. Pada tahun 1952 ia memprakarsai pembubaran Chung Hua Hui (CHH) karena berhimpun berdasarkan etnisitas tidak sesuai bagi para anggotanya yang sudah beralih menjadi warga Negara Republik Indonesia tetapi tidak berhasil. Kemudian perkumpulan CHH mengalami kemunduran sebab mahasiswa Indonesia keturunan Cina banyak yang keluar dari CHH dan masuk anggota PPI[13] (Persatuan Pelajar Indonesia) yang berwawasan

[11] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 195-196.
[12] Junus Jahja, *Catatan Seorang WNI: Kenangan, Renungan dan Harapan* (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1988), 9-10.
[13] Persatuan Pelajar Indonesia pembentukannya ikut diprakarsai Junus Jahja bersama para pelajar ex Mahasiswa Angkatan Perang , ex-Tentara Perang dll, dalam Riyanto D Wahono, *70 Tahun Junus Jahja* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997), 200-201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebangsaan Indonesia. Praktek dan latihan pembauran pri-nonpri di Rotterdam tersebut melalui kepengurusan dalam PPI adalah suatu investmen awal bagi masa depan generasi mendatang yang strategis dan penting bagi pemecahan masalah Cina di Indonesia, khususnya Jawa.[14]

Ketertarikannya terhadap masalah Cina disebabkan karena di Indonesia, seperti di Jawa masih terdapat proses yang bertentangan dengan yang diperjuangkan para mahasiswa etnis Cina di Belanda tahun 1952. Tokoh-tokoh keturunan Cina pada tahun 1954 justru mendirikan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang pada hakikatnya melanjutkan hidup berkelompok sebagai "Cina" asal Cina atau Peranakan Cina. Menurut Junus ini jelas menyalahi Sumpah Pemuda 1928, landasan utama Nation-building negara Indonesia.[15] Selain itu, Baperki dianggap juga akan membahayakan keturunan Cina, apalagi di tahun 1960-an pimpinan Baperki terlihat semakin condong ke kiri (komunis).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasannaya masalah Cina hanya dapat tuntas apabila dengan jalan asimilasi (pembauran). Gerakan Asimilasi terutama dipelopori oleh Junus Jahja. Dalam pandangannya, Islam sama dengan etnis Pribumi. Oleh karena itu asimilasi berarti memeluk Islam. Proses asimilasi ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Junus bersama kawan-kawannya ketika ia masih menjadi mahasiswa di Belanda. Pada tahun 1959 ketika Junus Jahja

[14] Junus Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 26.
[15] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali ke Indonesia, ia sering berkunjung ke redaksi *Star Weekly* untuk membaca Koran, majalah dan bertukar pikian di sana. Dari sinilah kemudain gerakan asimilasi ini dikembangkan. Bersama Letkol Soeparman dari SUAD I Markas Besar Angkaaan Darat dan para tokoh pengerak asimilasi[16] mendirikan panitia penyuluhan Asimilasi. Kemudian pada 24 Maret 1960 dicetuskan statement "Menuju Asimilasi Wajar". [17]

Konseptor utama dari Proses Asimilasi ini adalah PK Ojong yang berhasil mengumpulkan dukungan dari tokoh-tokoh lainnya. Gerakan asimilasi ini dilanjutkan dengan mengadakan seminar kesadaran nasional di Bandungan, Ambarawa pada 13-15 Januari 1961.[18] Dengan asimilasi dimaksudkan proses penyatuan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan pernyataan-pernyataan kebudayaan yang berbeda-beda menjadi satu kebulatan sosiologis yang hormonis dan bermakna yaitu dalam hal ini dinamakan bangsa Indonesia.

Untuk mendukung proses asimilasi (pembauran) H. Junus Jahja turut aktif dalam organisasi yang didirikan untuk menaungi Komunitas Tionghoa Muslim Indonesia yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia d/h Pembina Iman Tauhid Indonesia. PITI merupakan organisasi Tionghoa Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini awalnya bernama

[16] Tokoh penggerak asimilasi yaitu Lo Siang Hien, Ang Lian Tjay, Ong Hok Ham, K. Sindunatha.SH, Pk. Ojong dsb, dalam Junus Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 98.
[17] Ibid., 98.
[18] *Piagam Asimilasi*, dalam *Star Weekly* No.786-21 Djan 1961

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang didirikan pada tanggal 1963 sebagai gabungan dari Persatuan Islam Tionghoa[19] dan Persatuan Tionghoa Muslim[20]. Penggabungan ini dilakukan karena sifat dari kedua organisasi ini masih bersifat kedaerahan, sehingga pengaruhnya belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Tionghoa Muslim di Indonesia Pada akhir tahun 1972 Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dibubarkan. Sebagai gantinya kemudian dibentuk wadah baru bernama PITI akan tetapi merupakan singkatan dari Pembina Iman Tauhid Indonesia.[21]

Menurut Junus Jahja mengislamkan keturunan Tionghoa akan bermanfaat bagi golongan non-pri. Dalam buku Leo Suryadinata, Junus Jahja mengatakan bahwa apabila etnis Tionghoa memeluk agama Islam, segalanya akan terasa ringan. Karena Islam memberikan identitas dan kepribadian yang mantab kepada pemeluknya. Islam juga menuntut umatnya untuk berikhtiar dan membina diri menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang selalu dalam keadaan serasi dan seimbang dalam hubungan dengan Tuhannya, dalam hubungan sosial dengan masyarakat sekelilngnya, dan juda dalam hubungan dengan alam sekitar. Hal inilah yang merupakan landasan bagi etnis Tionghoa

[19] Persatuan Islam Tionghoa di dirikan di Medan oleh A Yap Song pada tahun 1953. Cabang-cabang dari organisasi ini tersebar diseluruh pulau Sumatra dan Sulawesi, sedangkan diantara sekian banyak maksud tujuannya ternyata ingin menaikkan prestise orang-orang Tionghoa yang beragama Islam dan mendirikan sebuah lembaga misionaris agama Islam untuk menyiarkan Islam khusu di kalangan masyarakat Tionghoa. Amen Budiman, *Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia* (Semarang: Tanjung Sari, 1979), 42.

[20] Persatuan Tionghoa Muslim didirikan di Bengkulu oleh kho Goan Tjin. Benny G Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (Jakarta: Trans Media Pustaka, 2008), 81.

[21] Budiman, *Masyarakat Islam*, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjalani kehidupan mereka sebagai Muslim.[22] Menurut Junus, banyak cara dan sarana yang dipergunakan Allah SWT untuk membukakan hati seseorang hingga menjadi Muslim. Ada yang karena mempunyai kawan-kawan Muslim yang simpatik dan memberi teladan baik, ada karena hal-hal emosional (dengan alunan adzan), spiritual (mimpi, inspirasi), kesedihan (jatuh sakit), kebahagiaan, melalui ilmu (bacaan-bacaan keagamaan) dan sebagainya.

Junus Jahja banyak mencurahkan waktunya, pikiran, dan tenaganya untuk Islam. Pada saat duduk sebagai Sekretaris di Majelis Ulama Indonesia Tingkat Nasional, ia mendirikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah sebagai sarana untuk mengislamkan nonpri secara masal.[23] Yayasan Ukhuwah Islamiyah didirikan pada tanggal 16 Oktober 1981 bersama Drs. H.Khozyn Arief, Drs. M Bidiyanta, Hambas, H, Sudrajat Brotokuntjoro. Yayasan ini melakukan dakwah di kalangan keturunan Tionghoa khususnya di lingkungan intelektual, pengusaha dan remajanya.[24] Selain mendirikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah Junus Jahja juga turut serta mengagas berdirinya Yayasan Haji Abdul Karim Oei. Yayasan ini didirikan pada 19 April 1991.[25] Selain sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan agama Islam di kalangan etnis Tionghoa, memberikan pendampingan bagi orang Tionghoa yang baru masuk

[22] Leo Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), 102.
[23] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 40.
[24] Yunus Yahya, *Muslim Tionghoa* (Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamyah, 1985), 10.
[25] Afthonul Afif, *Identitas Tionghoa Muslim di Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri* (Depok: Kepik, 2012), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, yayasan ini juga ditujukan untuk mengenang jasa dan kontribusi H. Abdul Karim Oei dalam penyebaran Islam di kalangan Tionghoa.

Ada beberapa alasan mengapa tokoh seperti H. Junus Jahja ini menarik untuk dikaji. Junus Jahja adalah tokoh yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air, seorang cendekiawan pemikir dengan latar belakang pendidikan di dunia barat sebagai ahli Ekonomi yang mempunyai potensi menjadi orang besar di bidang ekonom baik sebagai teknokrat atau penguaha besar tetapi beliau justru memilih untuk mengabdikan kehidupannya kepada masalah-masalah agama. Junus Jahja juga sebagai seorang tokoh pembauran yang tidak pernah mengenal lelah untuk mempelopori persatuan dan merintis kesatuan bangsa tanpa membedakan warna kulit dan latar etnis. Beliau juga merupakan tokoh penting dalam perkembangan Islam khususnya di kalangan warga negara keturunan Tionghoa di Indonesia, khususnya di Jawa. Beliau dikenal luas sebagai seorang yang giat dalam menyebarkan ajaran Islam meskipun baru pada tahun 1979 beliau masuk agama Islam tetapi semangatnya bahwa pembauran (asimilasi) hanya hanya dapat dilakukan melalui jalur agama yaitu agama Islam sudah ada sejak beliau masih beragama protestan. Dari hal demikianlah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul “Peran H.Junus Jahja Dalam Proses Asimilasi Antara Etnis Tionghoa Dan Pribumi Di Jawa (1960-2011)”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu karya ilmian merupakan hal yang sangat penting atau dapat dikatakan sebagai penentu. Karena dengan adanya rumusan masalah akan menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat hidup H.Junus Jahja (1927-2011)?
2. Bagaimana perkembangan Asimilasi yang terjadi antara etnis Tionghoa dan Pribumi di Jawa (1960-2011)?
3. Bagaimana kontribusi H. Junus Jahja dalam proses asimilasi antara etnis Tionghoa dan pribumi di Jawa (1960-2011)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui riwayat hidup H. Junus Jahja (1927-2011)
2. Mengetahui perkembangan asimilasi yang terjadi antara etnis Tionghoa dan Pribumi di Jawa (1960-2011)
3. Mengetahui kontribusi H. Junus Jahja dalam proses Asimilasi antara etnis Tionghoa dan pribumi di Jawa (1960-2011)

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kegunaan secara akademis/teoritis yakni dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang Peran H.Junus Jahja Dalam Proses Asimilasi Antara Etnis Tionghoa dan Pribumi di Jawa (1960-2011)

b. Kegunaan secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemahaman yang tepat tentang Peran H.Junus Jahja Dalam Proses Asimilasi Antara Etnis Tionghoa dan Pribumi di Jawa (1960-2011)

E. Pendekatan dan Kerangka Teori

Pendekatan dan kerangka teori merupakan suatu elemen penting yang wajib dimiliki dalam setiap penulisan penelitian. Sartono Kartodirjo mengemukakan bahwa pemaknaan atau penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan, yang mempuntai arti dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan, dan lain sebagainya. Hasil interpretasi akan sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan oleh seorang peneliti atau sejarawan.[26]

Dalam penelitian ini, sebagai konsekuensi logis dari tema maka menggunakan pendekatan historis dan pendekatan sosiologi. Dengan pendekatan historis penulis dapat menjelaskan latar belakang sejarah riwayat hidup H.Junus Jahja dari ia lahir sampai meninggal dan peran beliau dalam perkembangan proses asimilasi pada etnis Tionghoa.

[26] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, pendekatan sosiologi digunakan untuk meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan sosiologi digunakan untuk menggambarkan bagaimana keadaan masyarakat Tionghoa di Jawa dan perkembangan asimilasi yang terjadi antara masyarakat etnis Tionghoa dengan pribumi yang terdapat di Jawa.

Selain menggunakan pendekatan diatas penulisan ini juga menggunakan teori. Teori adalah suatu perangkat kaidah yang menuntun sejarawan dalam melakukan penelitiannya, menyusun data dan juga mengevaluasi penemuannya.[27] Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peranan. Menurut Dahrendoff dan Runciman peranan sosial dapat didefinisikan sebagai pola-pola atau norma-norma perilaku dari orang yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial.[28] Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Peranan lebih banyak menunjukkan fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencangkup tiga hal yaitu sebagai berikut:[29]

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

[27] Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 7.
[28] Peter Burke, *Sejarah Dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 68.
[29]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dengan teori ini diharapkan dapat dianalisis pengaruh dan peran H.Junus Jahja dalam perkembangan proses Asimilasi yang terjadi pada etnis Tionghoa di Jawa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kontribusi beliau dalam menggagas konsep asimilasi bersama cendekiawan-cendekiawan Tionghoa. Untuk memaksimalkan proses asimilasi yang digagasnya, beliau mendirikan Yayasan Abdul Karim Oei, mendirikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah dan juga turut dalam mengembangkan PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia). Hal ini dilakukan oleh Junus untuk memberikan pendampingan kepada orang-orang Tionghoa yang baru memeluk Islam.

Selain teori peranan, penulis juga menggunakan teori *Fungsionalisme Struktural*. Menurut George Ritzer semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain.[30] Dengan teori ini maka dapat dijelaskan bahwa Junus Jahja memiliki peran dan fungsi yang dominan dalam proses asimilasi. Sejak menjadi mahasiswa di Belanda, Junus telah mempraktekkan proses asimilasi dengan beberapa temannya dari kalangan Tionghoa yang berasal dari Indonesia. Pada saat itu, asimilasi masih dalam lingkup kecil kemudian tahun 1960, proses asimilasi mengalami perkembangan. Beberapa tokoh dari kalangan Tionghoa termasuk Junus Jahja mencetuskan konsep asimilasi. Junus termasuk pelopor utama dari konsep ini. Fungsi dan perannya juga dapat terlihat ketika mendirikan beberapa yayasan, menjadi anggota Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan juga turut dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia d/h Pembina Imam Tauhid Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan usaha untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan ditelili dengan beberapa topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga tidak terjadi pengulangan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Silsilati Faido berjudul "Kebijakan Asimilasi Etnis Tionghoa Pada Masa Orde Baru". Skripsi ini membahas mengenai kebijakan asimilasi pemerintah Orde Baru dalam bidang sosial, budaya dan politik. Dalam skripsi ini menggunakan

[30] George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode penelitian sejarah dengan hasil yang menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya kebijakan similasi oleh pemerintah pada masa Orde baru karena ekslusivisme etnis Tionghoa.[31]

2. Tesis yang ditulis oleh Luluk Wulandari berjudul "Peran Tokoh Tionghoa Di Organisasi Sosial Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) Dalam Membina Kerukunan Antar Etnis Di Kota Surakarta". [32] Tesis ini membahas tentang peran-peran yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Tionghoa di PMS dalam membina kerukunan antar etnis di Surakarta, penelitian ini mengkaji keseharian pengurus ketika berada di lingkungan Tionghoa dan ketika mereka berada di lingkungan sosial, selain itu dibahas juga mengenai perannya dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Penelitian yang dilakukan oleh Luluk iini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMS dimaknai berbeda antar pengurus, masing-masing memiliki tujuan berbeda ketika memutuskan untuk bergabung menjadi pengurus, panggilan hati, membangun jaringan bisnis, dan pengalaman konflik menjadi alasan tokoh Tionghoa bergabung di PMS.

[31] Silsilati Faidho "Kebijakan Asimilasi Etnis Tionghoa Pada Masa Orde Baru" (Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember, 2011), vii.
[32] Luluk Wulandari "Peran Tokoh Tionghoa Di Organisasi Sosial Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) Dalam Membina Kerukunan Antaretnis Di Surakarta", (Tesis, Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Firdaus Alansyah berjudul "Muslim Tionghoa Di Jakarta: Peran Yayasan Haji Karim Oie Sebagai Wadah Dakwah Muslim Tionghoa (1991-1998)".[33] Skripsi ini membahas tentang peran penting dari Yayasan Haji Karim Oei sebagai wadah Muslim Tionghoa Jakarta Dalam berdakwah. Yayasan ini menjasi salah satu ujung tombak Tionghoa untuk mengenalkan Islam ke etnis Tionghoa ditengah pandangan negative yang masih berkembang di kalangan etnis ini terhadap Islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh Dedy berjudul "Peranan Cheng Hoo Dalam Sejarah Perkembangan Muslim Tionghoa Di Indonesia (Presfektif Sejarah)".[34] Skripsi ini membahas mengenai latar belakang ekspedisi Laksamana Cheng Hoo di Indonesia, Sejarah perkembangan Muslim Tionghoa di Indonesia dan peranan Cheng Hoo dalam perkembangan muslim tionghoa di Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis dan juga pendekatan sosial historis.
5. Skripsi yang ditulis oleh Fadil Satrio Wicaksono berjudul "Peranan Cheng Hoo dalam Perkembangan Agama Islam di Indonesia pada Tahun 1405-1433". Skripsi ini membahas mengenai latar belakang kehidupan Cheng Hoo, peran Cheng Hoo dalam perkembangan agama Islam serta dampak peran Cheng Hoo dalam perkembangan Agama

[33] Firdaus Alamsyah "Muslim Tionghoa: Peran Yayasan Haji Karim Oei Sebagai Wadah Dakwah Muslim Tionghoa 1991-1998", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Adab dan Humaniora, Jakarta, 2017), i.
[34] Dedy "Peranan Cheng Hoo Dalam Sejarah Perkembangan Muslim Tionghoa di Indonesia (Presfektif Sejarah)", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Adab dan Humaniora, Jakarta, 2006), i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode historis. Hasil penelitian menunjukkan peran Cheng Hoo dalam agama Islam di Indonesia hanya sedikit yang tercatat dalam catatan-catatan Dinasti Ming. Dampak dari peran tersebut diantaranya muncul beberapa komunitas muslim Tionghoa, pembangunan masjid-masjid, komunitas Muslim China yang ada di Indonesia lebih terorganisir keberadaanya setelah dibimbing dan diarahkan oleh Cheng Hoo, sedangkan kehidupan bersama secara rukun dan damai hidup berdampingan menjadi warisan terbesar Cheng Hoo di Asia Tenggara.[35]

6. Buku yang ditulis oleh Drs Sam Setyautama berjudul "Tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia". Buku ini membahas tentang tokoh-tokoh Tionghoa salah satunya adalah Lau Chuan Tho (Junus Jahja). Dalam pembahasan mengenai Junus Jahja Sam hanya membahas tentang biografi sekilas beliau dan pendidikannya. Buku lainnya adalah buku berjudul "70 Tahun Junus Jahja: Pribumi Kuat Kunci Pembauran" yang ditulis oleh Riyanto D. Wahono. Buku ini membahas tentang kesan-kesan dari sahabat terhadap sosok dan pemikiran Junus Jahja. Selain itu buku ini juga membahas mengenai kenangan dari sahabat-sahabat Junus Jahja, kiprah beliau dari sejak ia menempuh pendidikan di Belanda hingga beliau. Di dalam buku ini juga dibahas biografi singkat beliau.

[35] Fadil Satrio Wicaksono "Peranan Cheng Hoo Dalam Perkembangan Agama Islam Di Nusantara Tahun 1405-1433", (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian tentang peran seorang tokoh dan komunitas Tionghoa di Indonesia memang banyak diteliti tetapi pembahasan mengenai judul terkait yaitu Peran H.Junus Jahja Dalam Proses Asimilasi antara etnis Tionghoa dan Pribumi di Jawa masih belum ada yang meneliti sehingga pembahasan mengenai judul tersebut akan sangat berbeda dari penelitian diatas.

G. Metode Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menghasilkan tulisan sejarah, lebih khususnya lagi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai "Peran H.Junus Jahja Dalam Proses Asimilasi Antara Etnis Tionghoa dan pribumi di Jawa (1960-2011)". Sebagai akibat dari tujuan tersebut, secara otomatis untuk merealisasikannya sudah barang tentu upaya merekontruksi masa lampau objek yang diteliti tersebut ditempuh melalui metode penelitian sejarah. Sebagaimana dilakukan oleh Kuntowijoyo setelah menentukan topik ada empat tahapan dalam penelitian sejarah yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan penulisan sejarah (hostoriografi). Sebagai prosedur untuk menghasilkan tulisan sejarah yang objektif peneliti berpegang teguh dengan langkah-langkah tersebut. Untuk lebih jelas, tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani *heur is hein*, artinya memperoleh Heuristik merupakan suatu ketrampilan dalam menemukan dan menangani dan merinci bibliografi atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan. Selain peneliti dapat mengumpulkan sebagian data, ia juga dapat mencatat sumber-sumber terkait yang digunakan dalam karya-karya terdahulu.[36] Kegiatan ini terutama ditujukan untuk menemukan dan menghimpun data sejarah dengan mencari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer untuk penelitian ini adalah

a. H Junus Jahja. *Islam Di Mata WNI.* Jakarta: Yayasan Haji Karim Oei. 1993.
b. H.Junus Jahja. *Acong Kemana….?*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran. 1999.
c. Junus Jahja. *Masalah Tionghoa Di Indonesia: Asimilasi Vs Integrasi*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran. 1999.
d. H.Junus Jahja. *Muslim Tionghoa.* Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah. 1985.
e. H.Junus Jahja. *Catatan Seorang WNI: Kenangan, Renungan dan Harapan.* Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.1988.
f. H.Junus Jahja. *Ganti Nama*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.1987.

[36] Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. H.Junus Jahja. *Kisah-Kisah Saudara Baru*. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah. 1989.

h. Junus Jahja. *Non-Pri Di Mata Pribumi.* Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991.

i. Junus Jahja. *Peranakan Idealis: Dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2003

j. Junus Jahja. *Pri-Nonpri Dan Konvensi Cina Sedunia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran. 1981

k. Departemen Dalam Negeri. *Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Kewarganegaraan, Asimilasi dan Orang Asing.* 1978.

l. Surat Kabar "Star Weekly" No. 786-21 Djan 1961. *Piagam Asimilasi.* 1961.

m. Surat Kabar "Star Weekly" No.739- 27 Februari 1960 oleh Ong Hok Ham. *Asimilasi Golongan Peranakan.*

n. Surat Kabar "Harian Kompas" tanggal 08 Nevember 2011 berjudul *Junus Jahja, Tokoh Pembauran Telah Tiada*.

Sementara itu sumber sekunder dapat berupa buku terkait penelitian yaitu

a. Yayasan Rahmat Semesta. *Dakwah dan Asimilasi.* Jakarta: Yayasan Rahmat Semesta.1979.

b. Tim BAKOM. *Asimilasi dan Islam.* Jakarta: BAKOM-PKB PUSAT. 1981.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Leo Suryadinata. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1988.

d. Leo Suryadinata. *Etnis Tionghoa dan pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES, 1999.

e. Amen Budiman. *Masyarakat Islam Tionghoa Di Indonesia*. Semarang: Tanjung Sari. 1979.

f. Riyanto D.Wahono. *70 Tahun Junus Jahja: Pribumi Kuat Kunci Pembauran.* Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.1997.

g. Sam Setyautama. *Tokoh-tokoh Etnis Tionghoa Di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2008.

h. Majalah Sinergi, Edisi ke-27/Tahun III/15 Januari 2001-15 Februari 2001.

Selain buku sumber sekunder juga diambil dari jurnal, artikel dan skripsi yang mendukung penelitian. Sumber sekunder didapat penulis dari penelusuran kepustakaan dan internet. Penelusuran kepustakaan dilakukan di Badan Arsip Wilayah Jawa Timur, Perpustakaan Medayu Agung, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Perpustakaan Daerah Jawa Timur.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan suatu metode untuk meneliti sumber-sumber yang dibutuhkan guna mengadakan penulisan sejarah. Kritik sumber penting untuk dilakukan mengingat tidak semua sumber dapat digunakan dalam sebuah historiografi. Kritik sumber dibedakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mencari keotentikan dan keaslian sumber sejarah. Kritik ekstern dilakukan pada temuan hasil primer yang didapat. Kritik intern dilakukan setelah sumber didapatkan lalu diolah dengan seksama. Perlu diperhatikan isi dari sumber apakah memang sudah dijamin kevalidannya. Hal ini didapat dengan melakukan cros-check antar sumber.[37]

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan kritik ekstern terhadap beberapa sumber berupa surat kabar dan buku karangan H. Junus Jahja yang mendukung terjadinya proses Asimilasi antara etnis Tionghoa dan Pribumi di Jawa. Dengan kritik ekstern penulis mencoba mencari tahu secara fisik tentang sumber yang diperoleh, apakah layak dan memang mempresentasikan sumber primer yang sesungguhnya. Sedangkan kritik intern juga penulis terapkan dalam skripsi ini, setelah sumber-sumber sejarah telah dianalisis dengan kritik ekstern, maka dianalisis lagi menggunakan kritik intern. Dengan cara mengcros-check ulang beberapa sumber yang telah diperoleh dengan sumber-sumber lainnya. Dengan tujuan agar dapat diketahui bahwa isi sumber tersebut kredibel.

[37] Aminudin Kasdi, *Pengantar Dalam Studi Sejarah Suatu* (Surabaya: IKIP, 1995), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan seperangkat alat kerja bagi seorang sejarawan untuk mengolah hubungan antar fakta yang didapatkan dalam sumber sebelum dilakukan penyusunan dan penulisan. Apakah sumber tersebut mencerminkan realitas historis, serta seberapa reabelkah informasi yang terkandung didalamnya, informasi yang terdapat dalam sumber tersebut dibandingkan dengan buku-buku yang lain, yakni informasi yang terdapat dalam sumber primer seperti telah disebutkan diatas, dengan bukti-bukti lain yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.[38]

Dalam langkah ini penulis membandingkan sumber primer berupa buku-buku karya H. Junus Jahja dan beberapa surat kabar terkait dengan asimilasi pada masyarakat Tionghoa dengan buku-buku lain yang terkait dengan permasalahan sehingga informasi yang terdapat dalam sumber primer memiliki kesesuaian dengan pembahasan skripsi peran H. Junus jahja dalam proses asimilasi antara etnis Tionghoa dan pribumi di Jawa (1960-2011).

4. Historiografi

Suatu upaya untuk menyusun atau merekontruksi fakta-fakta yang telah tersusun yang didapatkan dari penafsiran sejarawan terhadap sumber-sumber sejarah dalam bentuk tulisan.[39] Dalam penulisan sejarah ketiga kegiatan yang dimulai dari heuristic, kritik,

[38] Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 64.
[39] Hugiono dan Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan analisis belum tentu menjamin keberhasilan dalam penulisan sejarah.[40] Dalam hal ini dari semua data-data yang dikumpulkan yang sudah diteliti dan dikaji akan kebenarannya, maka setelah itu direkontruksi dalam bentuk karya tulisan. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dibaca dan berguna bagi orang lain.

Dalam langkah ini, penulis dituntut untuk menyajikan dengan bahasa yang baik dan benar, sehingga orang lain dapat memahaminya. Dalam penyusunan sejarah yang bersifat ilmiah, penulis menyusun laporan penelitian tentang peran H. Junus Jahja dalam proses asimilasi antara etnis Tionghoa dan Pribumi di Jawa (1960-2011). Yang mengacu pada pedoman penulisan skripsi jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulisan hasil penelitian skripsi ini akan menggunakan metode diakronik dan sinkronik yaitu digunakan untuk menjelaskan dan mendalami secara tematik dan tetap memperhatikan konteks kronologi dari perjalanan H. Junus Jahja serta kontribusinya dalam proses asimilasi antara etnis Tionghoa dan Pribumi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun suatu karya ilmiah dalam penyajian diperlukan sistematika yang mapan, karena dengan demikian akan mempermudah dalam memahami isi dari seluruh ragkaian penulisan itu sendiri. Demikaian pula halnya dengan penulisan karya ilmiah ini.

[40] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini akan terbagi menjadi lima bab utama dengan beberapa sub-bab yang mempunyai keterkaitan dengan bab tersebut. Untuk mendapatkan gambaran dari lima bab tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang diawali dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, akan menjelaskan tentang riwayat hidup H. Junus Jahja yang terbagi menjadi tiga sub bab yaitu pertama membahas latar belakang keluarga H. Junus Jahja, kedua membahas pendidikan H. Junus Jahja, dan terakhir membahas karya-karya dan karir dari H.Junus Jahja.

Bab III, membahas perkembangan asimilasi pada etnis Tionghoa di Jawa (1960-2011) yang terbagi menjadi tiga sub bab yaitu akan dibahas tentang kondisi etnis Tionghoa di Jawa pertengahan abad 20, diskursus asimilasi pada etnis Tionghoa di Jawa dan juga akan membahas tentang tokoh-tokoh penggagas asimilasi.

Bab IV, penulis menguraikan tentang kontribusi H.Junus Jahja dalam proses asimilasi yang terbagai menjadi tiga sub bab yaitu yang pertama akan membahas lahirnya konsep asimilasi oleh H. Junus Jahja, yang kedua membahas terbentuknya Piagam Asimilasi dan yang terakhir membahas usaha-usaha H.Junus Jahja untuk mencapai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asimilai total pada etnis Tionghoa. Pada sub bab terkhir akan dibagi lagi menjadi tiga sub bab kecil yaitu mengembangkan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia d/h Pembina Iman Tauhis Indonesia, mendirikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah dan Yayasan Haji Abdul Karim Oei.

Bab V merupakan bab penutup, sehingga dalam bab ini akan diberikan kesimpulan sebagai hasil dari analisa dan pembahasan. Selain kesimpulan, juga akan disampaikan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BIOGRAFI H. JUNUS JAHJA

A. Latar Belakang Keluarga H. Junus Jahja

Lauw Chuan Tho atau biasa dikenal dengan H. Junus Jahja lahir di Jatinegara, Jakarta pada 22 April 1927.[1] Junus disebut sebagai "anak mester" karena beliau lahir di Meester-Cornelis, nama wilayah satelit Jakarta ini berasal dari nama orang Bandaneira, guru agama Nasrani yakni "Meester" Cornelis Senen. Ayahnya bernama Lau Lok Soei. Beliau memiliki usaha bengkel roti (istilah dulu bagi pabrik roti) di Mester dengan nama *Insulinde*. Nama pabrik ini pada waktu itu cukup terkenal karena roti-roti yang diproduksi memiliki tanggal expirede yang lama. Umur roti ini dapat mencapai satu minggu lebih sehingga roti yang diproduksi ayah Junus disukai banyak penikmat roti dan memiliki pelanggan yang banyak. Ayah Junus dulu menjabat sebagai "*Eertste Wijkmeester den Chinezen"*, semacam kepala suku orang Cina Mester. Warga Cina yang memiliki permasalahan dengan Gubernemen terlebih dulu menghadapi Engko Bek yang menangani pemberian surat berkelakuan baik, izin untuk mengadakan rapat dan lain-lain. Dengan demikian seorang Engko Bek cukup disegani pada waktu itu. Terkadang seorang dari etnis Tionghoa yang memiliki masalah dan urusan dengan

[1] Riyanto D.Wahono, *70 Tahun Junus Jahja: Pribumi Kuat Kunci Pembauran* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

polisi, bisa mendapat tahanan luar atas rekomendasi dan tanggungan pribadi Engko Bek. [2]

Junus Jahja memiliki tujuh saudara, ia sendiri merupakan anak bungsu. Pada usia 60 tahun Lau Lok Soei (ayah Junus) wafat yaitu bertepatan pada tahun 1931 ketika Junus masih berusia 4 tahun. Junus Jahja belum begitu mengingat bagaimana ayahnya tetapi dari cerita ibunya bahwa ayah Junus memiliki sosok tinggi besar dan seorang yang memiliki jiwa sosial tinggi, senang bergaul dengan masyarakat luas tanpa membeda-bedakan latar belakang etnis maupun ekonomi. Akan tetapi, ayah Junus juga memiliki sifat buruk seperti suka berfoya-foya dan meminum minuman keras. Hal ini sering membut ibunda Junus merasa Jengkel. Lau Lok Soei dulu berasal dari keluarga keturunan kurang mampu, kakek Junus adalah seorang pedagang ikan asin yang sering berjualan di jalan Bilangan, Bekasi.

Ibunya bernama Oei Ay Nio. Ia memiliki sosok kecil dan memiliki paras yang lumayan cantik. Ibunya berasal dari desa Batur, Jawa Tengah. Apabila akan ke desa ini, jalannya hanya dapat dicapai dengan digotong memakai tandu. Oei Ay Nio pernah bercerita kepada Junus bahwa dulu orang-orang Cina dari Batur dan sekitarnya ikut hijrah dengan Sultan Agung ke daerah Banten di zaman perang melawan Belanda. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa di Banten, Serang dan sekitarnya bermukim keluarga-keluarga Cina berasal dari Batur yang sehari-hari

[2] Ibid., 191-192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkomunikasi memakai bahasa Jawa. Etnis Cina yang ada di Banten ini banyak yang bermatapencaharian sebagai pedagang tembakau. Mereka memiliki toko-toko tembakau di Jalan toko Tiga, Jakarta.[3]

Ibunya Junus, pandai menyanyikan tembang-tembang Jawa dan juga bermain gamelan ketika sedang resah. Ia tidak pernah mendapatkan pendidikan secara formal tetapi bisa membaca dan menulis sedikit-sedikit. Menurut Junus, Oei Ay memiliki IQ tinggi dan cerdas. Ketika ayahnya Junus meninggal dunia, Oie harus membesarkan 4 anak-anaknya yang belum dewasa sendirian.

Keluarga Junus Jahja (Lauw Chuan Tho) beragama protestan. Meskipun dari latar belakang keluarga beragama protestan tetapi Junus ketika masih bersekolah di Belanda sekitar tahun 1950-an tertarik dengan agama Islam. Sejak di Belanda sebagai mahasiswa disamping bergaul dengan teman se-etnik Tionghoa, ia juga akrab sekali dengan rekan sealmamater yang Indonesia asli atau pribumi. Junus sangat mengagumi tiga kawannya yang pribumi. Akan tetapi, mereka memiliki sisi negative dan positif. Yang satu beragama protestan, yang ke dua seorang Muslim taat bernama Moeljoto dan yang satunya merupakan Muslim tetapi abangan. Moeljoto memiliki prinsip yang sangat kuat, selalu tegar dan tegas dalam segala keadaan sedangkan teman protestannya soleh dan taat ke Gereja, ia sebagai orang yang cepat menyesuaikan diri dan pragmatis seperti halnya salah satu teman Junus yang abangan. Kehidupan sebagai

[3] Ibid., 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"abangan" dan "pragmatis" telah Junus Jahja alami sejak dulu sehingga hal ini menjadikan ia untuk lebih serius menentukan pilihannya. Sahabat muslimnya, ia jadikan panutan. Setelah mengamatinya selama beberapa tahun, sholat lima waktunya dan puasa ramadhan sahabatnya ini yang tidak pernah tertinggal. Hal inilah yang kemudian menjadikan Junus Jahja mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam.[4]

Junus Jahja memeluk agama Islam pada tanggal 23 Juni 1979.[5] Dengan ditemani dua kawannya, Slamet Sukirnanto dan Sudrajat Brotokusumo, ia mengucapkan ikrar dua kalimat Syahadat di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta tepat pada pukul 10.00 WIB. Junus Jahja mengucapkan Syahadat di hadapan Imam Masjid Agung yaitu Abd. Wahid Zauni BA. Beliau memang sengaja masuk Islam secara diam-diam. Sebelumnya ia mendapat tawaran agar Junus menunggu Buya HAMKA kembali dari luar negeri agar Buya dapat menuntun Junus masuk Islam, tetapi ia menginginkan seperti orang biasa saja.[6] Junus juga belajar Al-Quran kepada seorang mahasiswa perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an yang juga sebagai aktivis Masjid Agung Al-Azhar bernama Mukhlis.[7]

Menurut Junus, Islam menuntut seseorang dari segala ikhtiar untuk membina diri dan pribadi menjadi apa yang disebut Insan Kamil, manusia seutuhnya, the Perfect Man yaitu manusia yang selalu dalam keadaan serasi dan seimbang dalam hubungan dengan Tuhannya, dalam hubungan

[4] Junus Jahja, *Islam Di Mata WNI* (Jakarta: Yayasan H. Kario Oei, 1993), 66.
[5] Junus Jahja, *Muslim Tionghoa* (Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1985), 1.
[6] Ibid., 3-5.
[7] Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial dengan masyarakat sekelilingnya, dalam hubungan dengan alam sekitarnya, baik fisik maupun mental, lahir dan batin hingga manusia itu hidup damai dan penuh kepercayaan terhadap dirinya. Bagi setiap orang, pada dasarny memiliki bakat dan peluang yang sama untuk mencapai taraf Insan Kamil tanpa membedakan darimana asal usulnya. Pandangan hidup seperti ini, bagi Junus merupakan inti ajaran Islam yang perlu ia resapi dan praktekkan sebaik-baiknya.

Masuknya Junus ke agama Islam, pada awalnya terjadi kekhawatiran dan keraguan dari beberapa teman-temannya, tetapi atas nasehat sahabatnya Slamet Sukirnanto untuk tidak menghiraukannya, Junus semakin yakin dengan keputusannya.[8] Bagi Junus, ia memang dilahirkan sebagai seorang dari keturunan Tionghoa tetapi ia adalah seorang Indonesia dan sekarang seorang muslim sehingga menurutnya ia patut memperjuangkan tercapainya cita-cita Sumpah Pemuda tanpa perlu menonjolkan soal keturunan. Islam mengajarkan bahwa Allah menciptakan suku-suku dan bangsa-bangsa bukan untuk dipertentangkan satu sama lain, tetapi mereka justru harus bergaul dan saling mengerti.[9]

Ketika Junus Jahja memeluk agama Islam disambut baik oleh umat, khalayak ramai dan teman-temannya. Bahkan mingguan Tempo tanggal 23 Agustus 1980 menyambutnya dengan sebuah *cover-story* berjudul "Orang Islam Keturunan Cina-sebuah laporan". Beberapa orang Muslim juga mengiriminya ucapan selamat atas masuk Islamnya beliau.

[8] Jahja, *Islam Di Mata WNI*, 66-67.
[9] Jahja, *Muslim Tionghoa*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan sahabat non Muslimnya semenjak di negeri Belanda, Prof.Dr.P.Sidharta menghadiahkan Al-Quran edisi Lux dalam bahasa Inggris kepadanya. [10]

Di awal tahun 1960, pemerintah menggagas ganti nama bagi keturunan Tionghoa dengan nama-nama sesuai dengan statusnya sebagai warga Negara Republik Indonesia. Terutama setelah Menteri sosial bapak Moeljadi Djojomartono menyarankan untuk menganti nama bagi masyarakat Tionghoa seperti misalnya Tan menjadi Tanoyo, Ong menjadi Onggowarsito dan sebagainya.[11] Dari hal inilah Junus juga mengganti namanya, yang awalnya Lauw Chuan Tho menjadi Junus Jahja.

Pada tanggal 10 Oktober 1980 Junus Jahja berangkat ke Jeddah untuk menunaikan ibadah haji.[12] Sepulang ibadah haji, Junus aktif berdakwah di kalangan Tionghoa. Menurut Junus, mengislamkan keturunan Tionghoa akan bermanfaat untuk golongan nonpri. Di tahun 1982, Junus menikahi seorang perempuan bernama Tjitjih Rukaesih binti Suharja dan dikarunia seorang anak perempuan bernama Yuli Purwanti. Tjitjih berasal dari suku Sunda dan merupakan pribumi. Beliau juga memiliki dua orang cucu bernama Reynara Zalfiraldo Sujiwo dan Qays Rafa Yahya Sujiwo. Selain bermain dengan cucu-cucunya, ia mengisi masa tuanya dengan penuh semangat. Setiap pagi, setelah sarapan, ia berjemur di bawah sinar matahari sambil sesekali bercengkerama dengan

[10] Jahja, *Islam Di Mata WNI*, 68.
[11] Junus Jahja, *Ganti Nama* (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1987), 5.
[12] Junus Jahja (peny), *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tiongkok* (Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1984), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetangga sebelah rumahnya. Junus juga tetap mengikuti perkembangan dunia melalui televisi, majalah dan surat kabar. Setiap pagi hari ia dibacakan berita, koran harus habis dibaca dalam satu hari dan majalah harus selesai dibaca dalam satu minggu.[13] Pada hari senin 7 November 2011, Junus menghembuskan nafas terakhirnya akibat menderita sesak nafas [14]

B. Pendidikan H. Junus Jahja

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Pendidikan sebagai proses pengubahan dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan diri melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perluasan, dan cara mendidik.[15]

Pada usia enam tahun Junus Jahja bersekolah di Sekolah Dasar (SD) berbahasa Belanda yaitu *Hollands Chinese School* (HCS) yang didirikan khusus untuk anak-anak Cina. Pada awalnya Junus Jahja bersekolah di *Hollands Chinese School* (HCS) III Meester Cornelis dan kemudian pindah ke Jakarta Kota yaitu *Hollands Chinese School* (HCS) I di *Financienstraat* (sekarang Jalan Pegangsaan). Pada masa Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 Junus Jahja masih duduk di *Christelijke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* /Sekolah Menengah Pertama) kelas

[13] Dwi As Setianingsih "Junus Jahja dan Semangat Pembauran" Dalam http:Koran.kompas. com/read/xml/2009/08/20/03563569.junus.jahja.dan.semangat.pembauran.
[14] Kompas "Junus Jahja tokoh Pembauran Telah Tiada" Selasa 8 November 2011, 3.
[15] Dudung Rahmat, "Hakikat Pendidikan"Dalam https://www.google.co.id/url?q= http://fil e.upi.edu /Direktori /FPBS (Diakses pada 2 Desember 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua yang terletak di Gang Menjangan, wilayah Senen Jakarta. Seperti keturunan Cina lainnya, pendidikan formalnya tidak ia lanjutkan.[16]

Pada masa kedudukan Jepang, Junus jahja mempelajari bahasa Jepang dari seorang guru dari Minangkabau. Gurunya bernama Engku Anwar. Beliau merupakan putra pemilik sebuah restoran Padang yaitu Restoran Goncang Lidah di Pecenongan. Meskipun Junus keturunan Tionghoa (Cina) dan bersekolah di sekolah Belanda, Junus cukup fasih berbahasa Indonesia (bukan Melayu-Pasar). Hal ini menarik perhatian Engku Anwar untuk mengajari Junus berbahasa Jepang. Selain itu Engku juga mengkoreksi dan memperbaiki bahasa Indonesianya. Junus Jahja mempelajari bahasa nasional secara otodidak di zaman Jepang melalui surat kabar Asia Raya. Ia belajar bahasa Indonesia juga melalui korespondensi dengan teman sekelas di MULO yang meneruskan sekolah di SMP berbahasa Indonesia yang murid-muridnya hampir 100 % pribumi. Dari temannya bernama Tan Swan Nio, bahasa Indonesia Junus dibenarkan gramatika dan kosa katanya.

Pada tahun 1948 Junus Jahja meneruskan pendidikannya MULO Belanda di Jakarta. Kemudian di tahun 1949 Junus lulus AMS (*Algemene Middelbare School*, sekarang SMA). Setelah lulus AMS Junus Jahja bertolak ke Belanda dan melanjutkan pendidikannya di Universitas *Nederlandse Economische Hogeschool* (NEH) yang terletak di Rotterdam

[16] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanda.[17] Pada tahun 1950-an ketika berada di Belanda ia bertemu dengan mahasiswa Indonesia (pribumi). Mereka cukup heran bahwa ada keturunan Tionghoa yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Memang, keturunan Tionghoa lainnya, pada umumnya hanya bisa berbahasa Melayu-Pasar seperti memakai istilah "dia orang", "kita orang" dan sebagainya. Pergaulan Junus dengan kawan-kawannya membuat ia banyak belajar terutama mengenai masalah-masalah kebangsaan dan cita-cita masa depan ketika berada di Indonesia nanti.

Pada waktu bersekolah di Belanda, Junus gemar berdiskusi mengenai berbagai masalah masyarakat termasuk agama, tetapi ia paling tertarik jika berdiskusi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dimana masalah pembauran warga Negara Indonesia keturunan asing (terutama keturunan Tionghoa) merupakan fokus utamanya.[18] Junus termasuk orang yang memiliki IQ yang bagus. Seperti ketika di Sekolah Dasar ia pernah sekelas dengan seniornya. Pada waktu sekelas dengan kedua seniornya, senior Junus yang perempuan tidak ragu-ragu untuk menyontek kepadanya. Junus juga sering menyepelekan pelbagi hal dan malas menghafal ajaran guru. Akibatnya, ketika mendapat nilai yang sangat baik di kelas, mata pelajaran tersebut itu ia telantarkan, karena dianggapnya tidak menarik lagi. Hal ini menyebabkan di tahun-tahun selanjutnya nilai-nilai rapornya menurun. [19]

[17] Ibid., 193.
[18] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 27.
[19] Ibid., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebiasaan jeleknya tersebut masih dilakukannya ketika ia sudah menjadi mahasiswa. Pada tingkat pertama (propeadeuse) dapat ia selesaikan dalam waktu delapan bulan. Hal ini mengakibatkan, beliau ditawari untuk melakukan ujian selanjutnya (kandidat atau sarjana muda) dalam satu tahun (normalnya baru diperbolehkan setelah dua tahun). Akan tetapi, ia tempuh sampai empat tahun. Baginya pada saat itu, ilmu ekonomi mulai kurang menarik dan tidak menggairahkan lagi. Perhatiannya justru teralihkan di luar ilmu-ilmu finek (finansial ekonomi). Empat tahun kemudian Junus lulus menjadi sarjana muda ekonomi. Tingkat sarjana penuh ia selesaikan dalam waktu lima tahun setelahnya. Pada 15 Januari 1959 ia lulus dari NEH Rotterdam, Belanda bergelar doktor dan kembali ke Indonesia.

C. Karir dan Karya-karya H. Junus Jahja

1. Karir H. Junus Jahja

Junus Jahja memiliki karir yang cukup bagus selama hidupnya. Meskipun ia merupakan seorang keturunan Cina, ia fasih berbahasa Indonesia. Baginya, mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan aset yang tak ternilai. Ketika didirikan PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) pada tahun 1951, ia menjadi satu-satunya keturunan Tionghoa yang diikutsertakan sebagai pengurus pusatnya. Pada saat itu bersamaan dengan permintaan kawan-kawannya keturunan Cina untuk membubarkan Chung Hua Hui. Chung Hua Hui/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

CHH merupakan salah satu perkumpulan yang anggotanya hanya terdiri dari pelajar-pelajar keturunan Cina. Oleh karena perkumpulan ini hanya berdasar etnisitas membuat sejumlah anggotanya tidak setuju. Menurut mereka setelah menjadi warganegara Republik Indonesia maka tidak sepantasnya mengelompok sebagai Cina dan sebagainya.

Setelah mendapat gelar doktor di Rotterdam Belanda Junus kembali ke Indonesia. Di tahun-tahun pertamanya ia bekerja sebagai pegawai negeri di Departemen Pertanian. Ia di tempatkan di perusahaan Negara yaitu P.T. UPPI (Usaha Pengembangan Perikanan Indonesia). Perusahaan ini memiliki anggaran dana yang minim, hal ini menyebabkan Junus beralih pekerjaan ke bidang lainnya. Junus juga tidak terlalu fokus dengan pekerjaannya dan beliau justru semakin tertarik pada masalah-masalah Cina dari pada menekuni bidang finek. Dengan demikian karir Junus beralih dari bidang satu ke bidang lainnya.

Pada tahun 1960-an Junus bekerja pada Bank Koperasi Tani dan Nelayan (gabungan Bank ekspor Impor Indonesia dan Bang Rakyat Indonesia sekarang). [20] Pada masa awal Orde baru Junus aktif di *Indonesische Overzeese Bank* perwakilan Jakarta. [21] Ia juga pernah menjadi wakil untuk Indonesia di *MW Warburg Brinckman Wirtz &*

[20] Junus Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 43.
[21] Sam Setyautama, *Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa Di Indonesia* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Co (bankers), suatu bank milik Negara Jerman yang cukup bergengsi.[22]

Pada tahun 1960, selain bekerja pada Bank Ekspor Impor Junus juga aktif dalam gerakan pembauran keturunan Cina ke dalam masyarakat pribumi. Beliau bergabung dengan SUAD V (Staf Umum Angkatan Darat) yang mempunyai bagian UPKB/ BPPK (Urusan Pembinaan Kesatuan Bangsa/Badan Pembina Potensi Karya). UPKB terdiri atas 45 orang "pri" dan "nonpri" dari kalangan pemuda, mahasiswa, cendekiawan, ABRI, Pengusaha, alim ulama' dan lain-lain. Junus menjadi pengurus harian di UPKB. Ketika keadaan "SOB" (*Staat Van Oorlog en Beleg* atau keadaan darurat) dicabut oleh pemerintah, maka BPPK dengan segara aktivitasnya tidak diperbolehkan.[23]

BPKK di bawah Kol. S.Soekowati, Let.Kol.Djoehartono dan Mayor Harsono membentuk semacam Badan Kerjasama (BKS) golongan-golongan Karya dan Militer. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi dan mengkounter golongan-golongan ekstrim kiri PKI (Partai Komunis Indonesia), Partindo, dan Baperki. BPKK memiliki peran dalam membendung pengaruh dan kegiatan-kegiatan Komunis di tahun 1960-an. Pada 12 Maret 1963 para aktivis dan pejabat UPKB termasuk Junus Jahja mendirikan LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) untuk melawan Baperki yang secara sistematis ingin

[22] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 196.
[23] Jahja, *Islam Di Mata WNI, 49.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyesatkan para WNI (sebutan bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa) yang berhimpun atas ddasar persamaan etnisitas.[24]

Untuk menyelamatkan LPKB dari serangan Baperki yang berkuasa pada waktu itu, Pemerintah menjadikan LPKB badan resmi di bawah Menteri Koordinasi Kompartimen Hubungan dengan Rakyat, Dr.Roeslan Abdoelgani melalui Kppres no. 140/1963.[25] Sehubungan dengan pembentukan LPKB sebagai badan pemerintah, maka MPPR (Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi) menempatkan K.Sindhunatha dan Junus Jahja dalam staf sekretariatnya. Sindhunatha ditempatkan di bawah ketua MPPR Kol. Soetjipto dan Junus diangkat menjadi pembantu Kepala Seksi Politik dan Keamanan Kol. Soenarso. Ketika itu Junus mulai ikut dalam rapat dengan perwira-perwira ABRI, sebab staf MPPR hampir semua ABRI.

Tahun 1962 juga telah didirikan Yayasan Pembina Kesatuan Bangsa oleh sejumlah pendukung gerakan asimilasi. Yayasan ini kemudian berganti nama menjadi Yayasan Tunas Bangsa di tahun 1963 untuk menghindari dianggap identik dengan LPKB. Dalam Yayasan Tunas Bangsa, Junus menjabat sebagai Sekretaris I atau Sekretaris Harian.[26] Pada tahun 1963 Junus juga turut dalam keanggotaan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang diketuai oleh H.Abdul Karim Oei. Beliau juga turut mendirikan BAKOM

[24] Ibid., 49.
[25] Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 45.
[26] Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(PKB) singkatan dari Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa pada tanggal 28 Oktober 1977. Beliau menjadi pengurus bersama tujuh kawan lainnya. Badan ini kemudian dikukuhkan pendiriannya oleh Menteri dalam negeri pada 31 Desember 1977. Tujuan pokoknya membantu pemerintah dan masyarakat dalam bidang pembauran. Di tahun 1980 setelah Junus menunaikan ibadah haji, beliau juga diangkat menjadi anggota pengurus Majelis Ulama' Indonesia (MUI) hingga tahun 1990.

Pada 16 Oktober 1981 dengan Akte notaris Junus mendirikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah. Beliau mendirikan Yayasan ini dengan beberapa temannya yaitu Drs.H.Khozyn Arief yang merupakan dosen di IAIN Jakarta, Drs.M.Bidiyatna MA yang merupakan dosen di Universitas Indonesia, Hambas (wartawan) dan H.Sudradjat Brotokusumo. Yayasan ini didirikan untuk melakukan dakwah di kalangan keturunan Tionghoa khususnya di Lingkungan intelektual, pengusaha dan remajanya.[27]

Di tahun 1992 diangkat sebagai dewan penasihat ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pusat. Junus Juga mendirikan Yayasan Haji Abdul Karim Oei dan menjabat sebagai ketua. Pada Juni 1988 bersama Jusuf Hamka, Junus mendirikan Parpindo (Partai Pembauran Indonesia). Di masa pemerintahan Habibi, beliau sempat menjadi anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) pada 1998

[27] Jahja, *Muslim Tionghoa*, 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga 2003 dan dianugerahi Bintang Mahaputera Utama No.080/TK/1998 tertanggal 13 Agustus 1998.[28]

2. Karya-Karya H.Junus Jahja

a. Buku Garis Rasial Garis Usang Lika-Liku Pembauran

Buku ini diterbitkan oleh Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB) Jakarta tahun 1983 dengan tebal 233 halaman. Buku ini merupakan kumpulan karangan, termasuk di dalamnya terdapat beberapa tulisan Junus Jahja yang mengeditori buku ini. Buku ini diterbitkan setelah adanya pertemuan para anggota BAKOM-PKB dengan pimpinan BP-7 pada tanggal 25 Agustus 1983. Buku ini sebagai kumpulan tulisan dari beberapa penulis seperti K. Sindhunatha, Drs.Muh.Budiyatna, Harry Tjan Silalahi, Muhammad Hutabarat, Sarlito Wirawan Sartono dan lain sebagainya.

b. Buku Catatan Seorang WNI, *kenangan, renungan dan harapan*

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Tunas Bangsa yang terletak di Jl.Lautez 89 Jakarta pada tahun 1988. Buku ini memiliki tebal halaman 171. Buku ini berisi kenangan, renungan dan harapan Junus Jahja dari tahun 1950-1959 ketika beliau masih belajar di Universitas *Nederlandse Economische Hogeschool* (NEH) Rotterdam, Belanda dengan sesama bangsa (mahasiswa

[28] Setyautama, *Tokoh-Tokoh Etnis Tonghoa*, 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia dan WNI) dan dilanjutkan kemudian dalam masyarakat Indonesia sebenarnya setelah kembali ke tanah air di tahun 1959 .

c. Buku Muslim Tionghoa

Buku Muslim Tionghoa di terbitkan oleh Yayasan Ukhuwah Islamiyah. Buku ini berisi enam epilog mengenai kondisi Junus Jahja setelah masuk Islam. Adanya kegiatan dakwah Islamiyah di Lingkungan masyarakat Tionghoa selama kurun waktu 5-6 tahun, telah terjadi banyak perhatianyang dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan oleh Ulama, Cendekiawan dan tokoh-tokoh Islam. Sebagian karangan tersebut dikumpulkan oleh Junus Jahja dalam buku ini sehingga turut melengkapi gambaran mengenai Muslim Tionghoa dan perkembangannya. Selain itu buku ini juga menginformasikan dakwah serta ikhtiar pembauran menuju persatuan dan kesatuan bangsa melalui agama Islam.

d. Buku Non Pri Di Mata Pribumi

Buku ini merupakan kumpulan dari 50 karangan tentang orang-orang keturunan Tioghoa yang ditulis oleh orang-orang Indonesia Asli atau pribumi. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Tunas Bangsa. Dalam buku tersebut Junus menulis sebual epilog atau kesimpulan dengan judul utama “Pribumi Kuat Kunci Pembauran” dan sub-judul “WNI Belum Di Akar Rumput”. Junus Jahja mengawali tulisannya dengan mengutip Haluan Politik RI 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

November 1945 yang antara lain menyatakan akan mengusahakan agar selekasnya golongan Indo-Asia yang kebanyakan etnis Tionghoa (Cina) menjadi Indonesia sejati, menjadi patriot dan demokrat sejati. Akan tetapi menurut Junus hampir setengah abad setelah 1 November 1945 fakta menunjukkan bahwa WNI yang bersangkutan belum dianggap dan dirasakan sebagai sesama Indonesia oleh rakyat pada umumnya. Apalagi patriot dan tulisan-tulisan yang termuat dalam buku ini mencerminkan kondisi yang memprihatinkan itu.

e. Buku Islam Di Mata WNI

Buku ini diterbitkan pada tahun 1993 oleh Yayasan Haji Abdul Karim Oei. Buku ini berisi menganai penjelasan tentang siapa WNI yang selama ini disebutnya. Menurutnya, sebutan WNI seakan-akan khusus dipakai untuk orang-orang keturunan Cina saja. WNI merupakan keturunan Cina yang sudah berkewarganegaraannya Republik Indonesia. Sementara itu menurul Junus, mayoritas WNI umumnya sekarang dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang sedang dalam proses membaur.

f. Buku berjudul Kisah-Kisah Saudara Baru

Buku Kisah-Kisah Saudara Baru diterbitkan oleh Yayasan Ukhuwah Islamiyah tahun 1989 dengan jumlah halaman 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam buku ini Junus menceritakan tentang pertemuan beliau dengan beberapa orang-orang muslim baik dari pribumi maupun non pribumi dalam kegiatan-kegiatannya setelah masuk Islam sehingga ia menyebut mereka sebagai saudara baru karena menurutnya "sesama muslim adalah saudara"

g. Buku Ganti Nama

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Tunas Bangsa pada 1987. Buku ini berisi mengenai lika liku ganti nama bagi keturunan Tionghoa. Seperti Menteri Sosial R.I, Moeljadi Djojomartono yang menyarankan bagi warga Tionghoa untuk mengganti nama-nama mereka. Saran ini menuai tanggapan yang beragam ada yang 100% setuju, ada yang menentang dan juga ada yang netral. Dijelaskan pula dalam buku ini mengenai tanggapan dari beberapa pihak seperti Kwik Kian Gie, Ateng dan Mahbub. Di buku ini juga ditulis tentang kebijakan pemerintah tahun 1961 mengenai ganti nama.

h. Buku Pri-NonPri Dan Konvensi Cina Sedunia

Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran. Dalam buku ini Junus menjelaskan kondisi etnis Tionghoa di Indonesia. Junus Juga membahas mengenai Lee Kuan Yew yang pada tahun 1991 memprakarsai perhimpunan orang-orang Tionghoa atau mereka yang masih merasa Cina di Singapura secara eksklusif untuk pelbagi tujuan bisnis dan politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Buku Zaman Harapan Bagi Keturunan Tiongkok (Rekaman Dakwah Islamiyah 1979-1984)

Buku ini H.Junus Jahja bertindak sebagai penyunting yang diterbitkan oleh yayasan Ukhuwah Islamiyah tahun 1984. Buku ini berisi rekaman atau liputan kegiatan dakwah Islam terutama di kalangan masyarakat Keturunan Tionghoa di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1979-1984. Buku ini juga menjelaskan mengenai perkembangan Islam di kalangan warga Tionghoa yang begitu meningkat dari tahun ke tahun.

j. Buku Peranakan Idealis dari Lie Eng Hok Sampai Teguh Karya

Buku ini diterbitkan oleh KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Jakarta pada tahun 2002. Buku ini berisi biografi singkat dari beberapa tokoh Tionghoa Peranakan yang berjiwa idealis dan berjuang untuk Indonesia. Perjuangan ini mereka lakukan lewat berbagai macam cara tetapi intinya sama yaitu sebagai wujud rasa cinta pada Indonesia. Ada tokoh perintis kemerdekaan seperti Lie Eng Hok (1893-1961), pejuang penembus blockade Belanda seperti Jhon Lie (1911-1988), ekonom seperti Biyanti Kharmawan (1906-1980), seniman seperti Tan Tjeng Bok (1899-1985) dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Buku Masalah Tionghoa Di Indonesia: Asimilasi Vs Integrasi

Buku ini diterbitkan oleh Lembaga pengkajian Masalah Pembauran pada tahun 1999. Buku ini berisis polemik dalam mingguan "Star Weekly" Jakarta antara 6 Februari-25 Juni 1960. Walaupun sudah 4 dasawarsa yang lalu silat lidah tersebut isinya ternyata masih cukup aktual karena masalah yang dikemukakannya yaitu penyelesaian masalah Tionghoa di Indonesia tetap belum terpecahkan juga. Dari polemic tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya dua pendirian dalam masyarakat yang satu sama lain berbeda secara prinsipal. Masing-masing pendirian itunya tak terlepas dari visi, keyakinan pribadi, cara pendekatan serta bagaimana mendiagnosa masalahnya yang berbeda-beda. Yang menarik ialah bahwa kedua pendirian yang diperdebatkan pada awal tahun 1960-an itu kini nampaknya secara aktuil masih menjadi perbincangan.

l. Buku Acong Kemana…?

Buku ini di tulis oleh Junus sebagai tanggapan terhadap fenomena ajakan kembali kemasa lampau serta bernostalgia ke tanah leluhur. Sedangkan sudah jelas bahwa Acong (sebutan bagi orang Tionghoa) justru perlu ditampilkan dan menampilkan keIndonesiaannya dan buka keTionghoaannya yang dianggap masih kental. Ini semua agar yang bersangkutan tidak selalu dianggap orang asing di negeri ini. Sebab mereka justru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendambakan Acong dan generasi-generasi penerusnya secepatnya diterima sebagai orang kita oleh rakyat banyak hingga di akar rumput (*grassroot*.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERKEMBANGAN ASIMILASI ANTARA ETNIS TIONGHOA DAN PRIBUMI DI JAWA TAHUN 1960-2011

A. Kondisi Etnis Tionghoa Di Jawa Pertengahan Abad 20

Pulau Jawa mencakup 7 % wilayah Indonesia yang didiami sekitar 65 % penduduk dan merupakan pusat kegiatan politik Indonesia.[1] Di Pulau Jawa meskipun mayoritas masyarakatnya adalah suku Jawa tetapi dari sebagian penduduknya juga berasal dari berbagai etnis salah satunya yakni etnis Tionghoa. Belum diketahui secara pasti kapan mereka datang karena hingga sekarang masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang kedatangan mereka ke tanah Jawa. Menurut Onghokham, masyarakat etnis Tionghoa di Jawa datang sebagai perorangan atau dalam kelompok kecil. Mereka tiba di Jawa sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sebagian besar kaum migran ini menyatu dengan masyarakat lokal sehingga masyarakat etnis Tionghoa di Jawa sekarang tidak lagi bisa berbahasa mandarin.[2]

Etnis Tionghoa di Jawa kebanyakan berasal dari Provinsi Hokkian (Fujian) Tiongkok Selatan. Orang pribumi melihat mereka sebagai orang asing, dalam arti mereka adalah pendatang baru dan tergolong dalam kelompok lain. Masyarakat Tionghoa di Jawa pada umumnya terdiri dari

[1] Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa Dan Pembangunan Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1999), 152.
[2] Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang dan artisan, serta petani yang jumlahnya lebih sedikit.[3] Di pulau Jawa, orang Tionghoa lebih banyak terdapat di daerah Pasundan di Jawa Barat daripada daerah-daerah sebelah timurnya, meskipun Priangan yaitu pusat tanah Pasundan baru dibuka untuk permukiman orang Tionghoa oleh Belanda di akhir abad 19. Sekarang orang Tionghoa di Jawa sebagian besar tinggal di kota-kota. Pada akhir abad 19, pemerintah Belanda mengharuskan orang-orang Tionghoa tinggal di bagian kota yang sudah ditentukan dan hanya boleh keluar dari daerah itu jika mendapat izin dari pemerintah Belanda. Cara pembatasan tempat tinggal berakhir tahun 1919 bersamaan dengan meningkatnya gelombang imigran Tionghoa sesudah perang Dunia ke-1.[4]

Pada masa kekuasaan Belanda di Indonesia, orang-orang Tionghoa memperoleh peranan dan hak-hak istimewa daripada pribumi. Pemerintah Kolonial menempatkan orang-orang Tionghoa sebagai golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) setelah golongan pertama yaitu golongan Eropa dan golongan ketiga (yaitu orang-orang pribumi *inlanders*). Tiga golongan ini memiliki hak-hak yang berbeda. Pemerintah Belanda pada saat itu, umumnya menginginkan terputusnya jalur asimilasi yang dibangun oleh orang Tionghoa dengan Pribumi pada masa lampau. Belanda juga memisahkan perkampungan orang-orang Tionghoa dengan golongan Eropa dan golongan pribumi. Dari hal inilah kemudian Etnis Tionghoa cenderung hidup eksklusiv. Dari kebijakan politik penjajah yang

[3] Leo Suryadinata, *Negara Dana Etnis Tionghoa Kasus Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2002), 70.
[4] Mely G.Tan (Ed), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa* (Jakarta: PT Gramedia, 1979), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan politik memecah belah (*devide et impera*) menimbulkan kecemburuan sosial antara golongan pribumi dan Tionghoa. [5]

Masyarakat Tionghoa di Jawa bukan merupakan minoritas homogen. Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas Peranakan dan Totok.[6] Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah berbaur. Mereka bisa berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Totok adalah pendatang baru, umumnya baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa Tionghoa.[7] Mengenai kehidupannya, kaum Totok lebih suka bekerja untuk dirinya sendiri dan sebagian besar berkecimpung dalam bidang usaha. Kaum Peranakan lebih beraneka ragam bidang pekerjaannya.[8] Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyukai pekerjaan kejuruan dan pekerjaan administrasi atau staf di perusahaaan-perusahaan besa.r

Di Jawa, baik di kota besar maupun kecil, kaum Totok berkumpul di daerah-daerah pusat perdagangan, dengan ciri khas tinggal di rumah-rumah yang merupakan toko dan sekaligus juga tempat tinggal. Sementara itu kaum Peranakan tersebar lebih luas di seluruh kota dan tinggal di rumah-rumah yang tidak asal bisa ditinggali saja. Mereka menyukai rumah-rumah bergaya arsitektur barat modern. Dalam struktur kekerabatan. Kaum Peranakan mulai meninggalkan ciri-ciri patrilokal, patrilineal dan patriarkal yang sebenarnya merupakan dasar sistem

[5] Fahmi Rafika, "Integrasi Sosial Muslim Tionghoa", dalam *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Volume 9,No.2,Juli 2015, 106.
[6] Suryadinata, *Negara Dan Etnis Tionghoa*, 17.
[7] Suryadinata, *Etnis Tionghoa Dan Pembangunan Bangsa*, 252.
[8] Mely G.Tan, *Golongan Etnis Tionghoa*, 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisional Hokkian[9] dan yang pada umumnya masih khas dikalangan kaum Totok.[10]

Mayoritas masyarakat Tionghoa mengikuti atau memeluk agama dan kepercayaan Taoisme, Konfusianisme, Budhisme atau campuran dari ketiga-tiganya dan hanya sedikit yang memeluk Islam. Sejak Indonesia merdeka telah banyak orang Tionghoa yang dinasranikan termasuk elitnya menjadi Katolik.[11] Orang Totok sebelum masa kemerdekaan Indonesia di Jawa memiliki keyakinan agama yang berasal dari Cina Selatan. Mereka bersembahyang di kuil-kuil Cina dan melakukan pemujaan terhadap nenek moyang. Kaum peranakan memiliki sistem kepercayaan yang tercampur dengan kebudayaan pribumi. Walaupun konfusianisme dan *Samkauw* (Tiga Agama) sudah muncul pada pertengahan pertama abad ke-20, jumlah anggota perkumpulan-perkumpulan keagamaan itu tidak diketahui. Hanya sejumlah kecil saja Tionghoa yang menganut agama Islam (khususnya kelas bawah) dan Kristen (khususnya dari antara kaum peranakan yang berpendidikan Belanda).[12]

Orang-orang Tionghoa yang tinggal di Jawa memiliki jumlah yang hampir sama dengan wilayah luar Pulau Jawa. Di tahun 1956-1961 jumlah orang Tionghoa yang tinggal di pulau Jawa berkurang. Hal ini disebabkan

---

[9] Orang-orang Hokkian adalah orang Tionghoa yang pertama kali bermukim di Indonesia dalam jumlah besar, dan mereka merupakan golongan yang terbesar di antara imigran-imigran sampai abad ke-19. Daerah asal mereka adalah Fukien Selatan, suatu daerah yang sangat penting menurut catatan sejarah perdagangan luar negri Tiongkok. Orang-orang Hokkian dan keturunannya yang sudah berasimilasi merupakan golongan bahasa Tionghoa terbesar di Indonesia Timur sebagai keseluruhan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta di Pantai barat Sumatra. Ibid., 7.
[10] Ibid., 12.
[11] Jahja, *Islam Di Mata WNI*, 4.
[12] Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: PT Grafiti Press, 1984), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena orang Tionghoa banyak yang kembali ke RRC (Republik Rakyat Cina) pada tahun 1960.[13] Pelabuhan-pelabuhan besar pulau Jawa, baik yang untuk imigrasi maupun perdagangan, semuanya terletak di sepanjang pantai utara Jawa menghadap langsung laut Tiongkok Selatan, akibatnya penduduk Tionghoa terpusat disana.

Pada pertengahan abad ke-20, pemerintah Indonesia memindahkan sebagian besar orang Tionghoa asing dari desa-desa Jawa Barat. Sebagai akibatnya, orang Tionghoa di Jawa yang tinggal di kota jauh lebih banyak. Menurut angka cacah jiwa tahun 1956, orang-orang Tionghoa merupakan 10 persen sampai 11 persen dari seluruh penduduk semua kotapraja yang diresmikan di Jawa. Presentase terkecil terdapat di Yogyakarta yang berpenduduk Tionghoa sebanyak 4,5 persen dan yang terbesar ialah di Cirebon yag berpenduduk Tionghoa sebanyak 20,8 persen dari seluruh penduduk pada tahun 1956.[14]

Pada abad 20, kondisi masyarakat Tionghoa di Indonesia khususnya Jawa memang mengalami berbagai perubahan. Di samping perubahan-perubahan kebijakan pemerintah Kolonial terhadap komunitas Tionghoa, orang Tionghoa juga mulai menunjukkan kepedulian terhadap masalah politik. Gejala ini muncul berkaitan dengan perubahan politik di negeri Cina yaitu mulai berkembangnya kesadaran nasional. Pengaruh dari Cina telah terasa sejak berdirinya organisasi Cina pertama bernama *Tiong Hwa Hwe Koen* (THHK). Organisasi ini didirikan sebagi wadah untuk

[13]Mely G.Tan, *Golongan Etnis Tionghoa,* 3-4.
[14] Ibid., 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatukan orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam rangka mencapai cita-cita ideal bangsa Tionghoa. Selain itu THHK juga berfungsi sebagai wadah berhimpun dan menyediakan berbagai program kebudayaan dan ekonomi yang dimaksudkan untuk memperkuat posisi mereka di Indonesia.[15]

Dominasi THHK di kalangan orang Tionghoa di Jawa mulai melemah pada 1928 menakala seorang anggotanya yaitu H.H.Kan mendirikan organisasi untuk menandingi THHK bernama Chung Hua Hui (CHH). Didirikannya organisasi ini karena H.H.Kan merasa THHK tidak representative karena kurang mengakomodasi kepentingan orang Tionghoa di Hindia Belanda. Aspirasi politik CHH sangat berbeda dengan THHk, karena CHH lebih menekankan integrasi. Mereka tidak setuju atas sikap THHK yang lebih loyal kepada negeri leluhur. Di tahun 1931 muncul organisasi lain yaitu Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang berorientasi ke Indonesia. Baik PTI maupun CHH sama-sama memiliki kecenderungan integrasionis, dimana komunitas Tionghoa dipandang sebagai satu kesatuan kepentingan politik yang terpisah dari komunitas lain.

Keterlibatan orang Tionghoa dalam politik memang sudah bermula sejak sebelum Indonesia merdeka. Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda, golongan yang pro Belanda menjadi tertekan. Golongan yang berorientasi ke Cina tetap hidup, walaupun dengan gaya yang lain,

[15] Tarmizi Taher, *Masyarakat Cina Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), 1997), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan golongan yang pro Indonesia tetap saja keadaannya. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, meskipun golongan yang berorientasi ke Cina muncul kembali, golongan yang pro Belanda mulai bangkit sementara itu golongan yang beroreintasi ke Indonesia mulai menunjukkan kekuatannya. Meskipun elit peranakan Tionghoa sudah berorientasi kepada kelompok masing-masing, akan tetapi posisi politik mereka masih tetap sama. Visi politik orang Tionghoa setelah kemerdekaan dikuasi oleh kaum integrasionis. Oleh karena berpegang pada anggapan bahwa orang Tionghoa berbeda dengan pribumi dalam segala hal, maka perasaan menjadi minoritas semakin kuat.[16]

Di Jawa, terdapat dua organisasi sosio-politik milik etnis Tionghoa yang penting yaitu Baperki yang didominasi oleh Peranakan Tionghoa dan Qing Zong yang dikuasai Totok Tionghoa, terutama mereka yang berwarganegara asing.[17] Pemerintahan Soekarno memang mentolelir adanya organisasi sosio-politik etnis ini. Baperki[18] yang didirikan pada tahun 1954, berusaha untuk mendapatkan persamaan antara sesama warga negara Indonesia tanpa pandang latar belakang rasnya. Baperki

[16] Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, 26.
[17] Ibid., 81.
[18] Baperki merupakan singkatan dari Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia yang didirikan pada tahun 1954. Organisasi ini dipimpin oleh Siau Giok Tjhan. Tujuan didirikannya adalah untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam soal-soal kewarganegaraan bagi WNI keturunan Cina dan secara tersirat "membina" mereka agar tidak macam-macam tetapi betul-betul menjadi Indonesia yang baik. Mayoritas anggotanya nyaris 100 persen WNI. Baperki menarik mereka dengan fasilitas sosial dan pendidikan yang sangat dibutuhkan, beberapa tahun setelah didirikan anggotanya berjumlah 260.000. Kebanyakan anggotanya pasif karena mereka hanya tertarik pada fasilitas-fasilitas sosial dan edukasinya. Oleh pemimpinnya secara perlahan dijadikan perkumulan politik yang bahkan turut dalam pemilu 1955 dengan daftar calon sendiri. Haluan politik Baperki semakin condong ke kiri dan pemimpinnya erat dengan PKI dan anteknya Partindo (Partai Indonesia). Pada saat terjadi gerakan 30 September 1965, menurut Pemerintah RI, ada indikasi kuat pemimpin Baperki ikut terlibat. Sehingga di seluruh Indonesia Baperki dibubarkan. Junus Jahja, *Islam Di Mata WNI*, 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa orang Tionghoa merupakan satu bagian dari suku bangsa Indonesia. Jadi orang Tionghoa kedudukannya sama denga suku-suku Indonesia seperti Jawa, Sunda dan Minang. Dengan kata lain, orang Tionghoa tidak perlu meleburkan diri ke dalam masyarakat pribumi. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Baperki menjadi organisasi masa. Ia menitikberatkan integrasi di kalangan Tionghoa. Organisasi ini condong ke kiri (komunis) dan mendekati Soekarno untuk mendapatkan perlindungan. Politik kiri inilah yang akhirnya membawa Baperki musnah setelah terjadi Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia.[19]

Dalam hal politik di tahun 1950 hingga 1960-an, memang belum terjadi perubahan yang berarti bagi orang Tioghoa maupun dalam hubungannya dengan masyarakat pribumi. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya semangat anti Cina terus menguat dan keinginan untuk memperkokoh posisi ekonomi di kalangan pribumi juga menguat. Secara ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya Jawa cukup kuat. Kekuatan ini bisa dijelaskan dengan perkembangan sejarah dan politik Kolonial Belanda. Orang-orang Tionghoa khususnya sangat kuat dalam sektor bisnis dan finansial serta dalam perdagangan distributif Negara.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menerapkan kebijakan Politik Benteng yang bertujuan untuk melaksanakan Indonesianisasi perdagangan ekspor-impor dan sekaligus membatasi peran orang-orang

[19] Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tionghoa dalam sektor ekonomi.[20] Selain itu kebijakan ini dilakukan untuk melemahkan kedudukan ekonomi orang Tionghoa dan membantu para pengusaha pribumi.[21] Pada tahun 1956 pemerintah juga menerapkan Gerakan Assaat yang bertujuan untuk mengurangi kekuasaan orang Tionghoa dalam perekonomian. Tuntutan lainnya adalah diadakannya garis pemisah antara bangsa Indonesia dan warga Negara Tionghoa serta perlindungan khusus bagi kepentingan pribumi. Gerakan ini tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan oleh praktik kolusi yang terjadi antara pengusaha Tionghoa dan pribumi.

Namun di tahun 1959, keinginan untuk menegakkan ekonomi kalangan pribumi semakin didukung oleh pemerintah dengan dikeluarkannya aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 10. Kebijakan ini menetapkan larangan kegiatan perdagangan bagi pihak asing di daerah Swantara I dan II serta Karesidenan. Dengan sendirinya banyak orang Tionghoa yang saat itu masih berstatus warga Negara ganda atau asing harus pindah ke kota yang lebih besar dan meninggalkan jaringan dagang yang selama itu mereka kuasai.[22]

Proteksi terhadap pengusaha pribumi dan pengusiran pedagang Tionghoa dari daerah pedesaan di antara tahun 1950-1960 tidak berhasil mengurangi partisipasi ekonomi orang Tionghoa di Jawa. Hal ini justru menimbulkan fenomena baru yang dikenal dengan sebutan perusahaan "Ali Baba" yaitu persengkokolan antara pengusaha Tionghoa dan pribumi

[20] Taher, *Masyarakat Cina*, 72.
[21] Suryadinata, *Etnis Tionghoa Dan pembangunan Bangsa*, 179.
[22] Taher, *Masyarakat Cina, 73.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang lisensi. Orang Tionghoa mengelola bisnisnya dan membagi keuntungan dengan pemegang lisensi. Kerjasama seperti ini kemudian berkembang menjadi persekutuan baru yang dikenal dengan sistem Cukong.[23] Cukong adalah istilah Hokkian yang artinya majikan atau bos, tetapi dalam konteks keindonesiaan, istilah itu digunakan untuk menyebut pedagang Tionghoa yang bekerjasama dengan elite yang berkuasa. Umumnya mitra pribumi memberikan fasilitas dan perlindungan sedangkan orang Tionghoa memberikan modal dan menjalankan perusahaan tersebut.[24]

Para Cukong memang tidak memiliki posisi formal dalam pemerintahan, tetapi kedekatan hubungan mereka dengan pejabat tinggi dan militer mampu mempengaruhi proses tender dan menentukan proyek, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar. Sebagai contoh, Liem Sioe Liong, yang disinyalir dekat dengan penguasa berhasil menguasai kerajaan bisnis dengan asset tiga setengah milyar dolar pada 1980.

Sistem Cukong dianggap pengusaha pribumi merugikan mereka dan mengakibatkan timbulnya konflik dan kritik pada era Orde baru. Protes yang timbul di kalangan pedagang pribumi dan kerusuhan anti Tionghoa yang semakin sering terjadi maka pemerintah Orde baru mulai melaksanakan Politik Pribumi Kembali. Untuk memperoleh bagian yang lebih besar bagi pribumi dalam ekonomi, pemerintah mengeluarkan

[23] Suryadinata, *Etnis Tionghoa Dan pembangunan Bangsa, 180.*
[24] Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa, 91.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan dimana ditentukan bahwa semua penanaman modal asing harus berupa perusahaan patungan. Peraturan yang mencerminkan kebijakan ini yaitu Keppres No.14 tahun 1979 yang kemudian disempurnakan menjadi Keppres No.14A/1980 yang mewajibkan pemerintah dan kementrian memberikan keistimewan kepada pedagang dan kontraktor pribumi.[25]

Dalam hal pendidikan, pada masa Jepang sebagai bagian dari kebijakannya untuk membatasi pengaruh Barat, sekolah-sekolah Belanda[26] dan Barat ditutup. Sekolah yang diperbolehkan pada saat itu adalah sekolah berbahasa Cina dan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka terjadi kenaikan jumlah sekolah-sekolah Tionghoa yang pesat. Pada mulanya pemerintah Indonesia tidak terlalu mempedulikan pendidikan orang Tionghoa. Tidak ada pengawasan khusus terhadap sekolah-sekolah yang didirikan Tionghoa. Namun dengan konsolidasi kekuasaan politiknya, pemerintah mulai mengalihkan perhatiannya terhadap sekolah-sekolah ini. Sekolah tersebut terdiri dari sekolah pro-Beijing dan pro-Taipei. Pada tahun 1957 pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa warga Negara Indonesia keturunan asing tidak diizinkan bersekolah di sekolah asing yaitu sekolah yang menggunakan bahasa Cina sebagai pengantar.

---

[25] Ibid., 91.

[26] Belanda mendirikan sekolah bernama HCS yaitu sekolah untuk orang Tionghoa dengan pengantar bahasa Belanda yang disesuaikan dengan model sekolah Eropa. Di sekolah ini bahasa atau kebudayaan Cina sama sekali tidak diajarkan. Sekolah ini didirikan karena adanya rasa kekhawatiran atas kondisi pada saat itu dimana sekolah Tionghoa yang didirikan oleh komunitas mereka semakin meluas dan kekhawatiran bahwa Tionghoa peranakan akan tenggelam ke dalam orbit kebudayaan Cina, dengan demikian dapat merangsang rasa nasionalisme Can mereka. Pendidikan modern orang Tionghoa di Indonesia dimulai dengan didirikannya Tiong Hoa Hak Tong (sekolah Tionghoa) di bawah sayap Tiong Hwa Hwee Koan (THHK) Di Jakarta. Sekolah THHK sangat popular dan tak lama kemudian berdiri dimana-mana di seluruh Hindia Belanda. Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, 153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1958 di Indonesia gencar dilakukan kampanye anti Kuomintang karena campur tangan Taipei dalam pemberontakan di daerah. Sekolah Cina yang dianggap ada hubungannyya dengan Kuomintang ditutup. Di tahun 1965, sebuah kudeta yang melibatkan Komunis dapat digagalkan. Beijing dikait-kaitkan dengan hal ini sehingga mengakibatkan sekolah-sekolah pro Beijing juga ditutup. Walaupun setelah tahun 1968, sejumlah sekolah khusus didirikan oleh masyarakat Tionghoa, sekolah ini disebut *Sekolah Nasional Proyek Khusus* dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia.[27]

Pada masa pemerintahan Orde baru memang terjadi diskriminasi secara terang-terangan pada etnis Tionghoa. Selain melarang adanya organisasi sosial-politik Tionghoa, pemerintah juga menerapakan kebijakan-kebijaan yang melarang adanya aktivitas-aktivitas sosial kebudayaan orang Tionghoa. Mereka diharuskan untuk berasimilasi secara total. Pemerintah Orde baru menerapkan kebijakan ganti nama bagi masyarakat Tionghoa. Mereka diharuskan mengganti nama Tionghoanya menjadi Pribumi. Hal ini dilakukan pemerintah karena konsep Nation Building yang dianut pemimpin Orde baru. Kepentingan orang Tionghoa masa ini diwakili oleh beberapa tokoh Tionghoa yang ada hubungannya dengan penguasa.

[27] Suryadinata, *Etnis Tionghoa Dan pembangunan*, 173-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Diskursus Asimilasi (Pembauran) pada Etnis Tionghoa Di Jawa (1960-2011)

Status sebagai warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, tidak menjadikan etnis ini diterima sepenuhnya oleh penduduk asli atau pribumi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tanah leluhur etnis Tionghoa bukanlah Indonesia melainkan Negara Cina. Untuk berasimilasi dengan masyarakat pribumi, sebagian dari mereka telah menggunakan nama-nama pribumi. Akan tetapi, hal ini tidak membuat keadaan menjadi berubah karena mereka masih dianggap berbeda dengan masyarakat pribumi.Tidak dianggapnya etnis Tionghoa sebagai masyarakat asli pribumi dikarenakan oleh gaya hidup masyarakat Tionghoa yang cenderung eksklusif. Mereka hanya bergaul dengan orang-orang kalangan tertentu saja. Bersama-sama pemerintah, etnis Tionghoa melaksanakan program-program asimilasi yang diberlakukan. Hal ini dilakukan demi tercapainya kehidupan harmonis dengan masyarakat setempat.

Jika melihat sejarah bangsa Indonesia, masalah mengenai asimilasi sudah menjadi topik yang menarik dibicarakan dari sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdirinya Partai Tionghoa Indonesia (PTI) di tahun 1932. PTI mencetuskan ide asimilasi di kalangan Tionghoa untuk pertama kalinya.[28] Partai Tionghoa Indonesia didirikan di Surabaya pada 25 September 1932 oleh Liem Koen Hian (1896-1952).[29] PTI didirikan karena perkembangan kelompok *Sin Po* yang mendukung

[28] Panitia Penyuluhan Asimilasi, *Lahirnya Konsepsi Asimilasi: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia* (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1977), 19.
[29] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasionalisme Cina dan kelompok Chung Hua Hui (CHH) yang berorientasi ke pemerintah Belanda. PTI ingin menandingi pengaruh kedua kelompok tersebut dalam orientasi nasional yang berada di Indonesia khususnya Jawa.

Partai Tionghoa didirikan dengan tujuan untuk membantu Indonesia membangun bidang ekonomi, sosial, dan politiknya menuju ke suatu Negara dimana rakyat menikmati hak-hak dan kewajiban yang sama. PTI menyetujui adanya pembedaan antara kaum Totok dan Peranakan.[30] Menurut Liem, Tionghoa Totok dan Peranakan mempunyai tujuan hidup yang berbeda. Kaum Totok akan kembali ke negeri Cina setelah mendapat nafkahnya, sedangkan kaum Tionghoa Peranakan tidak mempunyai tempat lain yang dituju. Nasib orang Tionghoa Peranakan tidak tergantung kepada Cina, karena itu mereka harus mandiri dan bersahabat dengan orang-orang Indonesia.[31] Oleh karena itu, partai ini berusaha untuk menyebarkan paham bahwa peranakan Tionghoa adalah *Indonesier* yang lahir, hidup dan mati serta dikubur di negeri ini.[32] Dengan demikian, akan timbul rasa cinta di dalam diri mereka terhadap Indonesia termasuk juga terhadap Jawa.

PTI memiliki beberapa cabang, di Jawa Timur cabang PTI ada di Malang dan Mojokerto, di Jawa Tengah cabang PTI terdapat di Semarang dan Salatiga/Ambarawa, di Jawa Barat cabangnya ada di Bogor dan Tasikmalaya. Tujuan PTI membentuk cabang-cabang di kota besar seperti

[30] Suryadinata, *Dilema Minoritas*, 52.
[31] Ibid., 54.
[32] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bandung dan Jakarta sulit dilakukan karena aliran nasionalis Tiongkok sangat kuat. Jakarta memang pintu gerbang perantau-perantau dari negeri Cina. Pedagang - pedagang besar Tionghoapun mengelompok di sana. Mereka memiliki pengaruh besar di perkumpulan-perkumpulan perniagaan yang bercorak eksklusif. Walaupun demikian eksistensi PTI tidak dapat dievaluasi dari cabang atau banyaknya anggota, yang terpenting ialah cita-citanya yang memberi kesan positif kepada sebagian besar organisasi pergerakan Indonesia.[33]

Partai Tionghoa Indonesia, berhubung sudah memiliki cabang, dalam suatu rapat dibentuk *Hoofdbesturr* atau pengurus besar (Istilah sekarang DPP). Liem Koen Hian dipilih sebagai ketua , Tjoa Tjie Liang (Anang S) sebagai sekretaris, dan Mr Ko Kwat Tiong (Tahun 1945 mengganti nama menjadi Mohammad Saleh) sebagai komisaris. Dalam kegiatannya PTI memprotes berlakunya *Wilde Scholen Ordonnantie* (ordonasi sekolah liar) oleh penguasa Belanda yaitu larangan berdirinya sekolah-sekolah tanpa izin. PTI mendramatisir protes tersebut dengan mendirikan sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Di Dewan Perwakilan Legislatif, seperti Dewan Perwakilan Kotapraja, Dewan Perwakilan Kabupaten dan Volksraad, wakil-wakil PTI bekerjasama dengan wakil-wakil golongan Pribumi. [34]

Setelah Indonesia merdeka, memang banyak presepsi-presepsi negatif mengenai etnis Tionghoa yang berada di Jawa, hingga tidak jarang

[33] Ibid., 285.
[34] Ibid., 285-286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak terjadi kerusuhan antara pribumi dengan Tionghoa. Hal ini didasari kecurigaan pribumi mengenai keberadaan etnis Tionghoa yang tidak dapat diketahui arah dukungannya setelah Indonesia merdeka. Sebagai contoh peristiwa pembantaian terhadap etnis Tionghoa yang berada di daerah Tanggerang pada 3 Juni 1946, dimana *The New York Time* edisi 6 Juni melaporkan korban yang jatuh di pihak etnis Tionghoa yang dituduh bekerjasama dengan Belanda dalam peristiwa tersebut berjumlah 600 orang.[35] Dalam huru hara yang berlangsung selama tiga hari tersebut sebanyak 1500 rumah penduduk Tionghoa dibakar, dan tidak kurang dari 25.000 orang Tionghoa melarikan diri ke Jakarta.[36]

Setelah Indonesia merdeka, di tahun 1946 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa etnis Tionghoa yang baik yang ada di Jawa maupun luar Jawa merupakan warga Negara Indonesia. Undang-undang Kewarganegaraan tersebut menerapkan *Ius Soli* (berdasar daerah kelahiran) dan sistem pasif. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia terdiri dari orang asli yang lahir dan telah menetap selama 5 tahun berturut-turut, serta mereka yang telah berumur 21 tahun. Orang-orang asing, salah satunya adalah etnis Tionghoa, dapat menjadi Warga Negara Indonesia jika mereka tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.[37] Akan tetapi, warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa juga terikat dengan Undang-Undang Kebangsaan Ching tahun 1909 yang

[35] Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, 581.
[36] Taher, *Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi*, 70.
[37] Suryadinata, *Dilema Minoritas.* 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan mereka memiliki kewarganegaraan ganda yaitu Cina dan Indonesia.

Perjanjian ini lahir karena kekhawatiran Indonesia terhadap kaum Komunis di Cina yang dapat disalurkan melalui warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, setelah orang-orang Komunis merebut kekuasaan di Cina Daratan. Selain itu perjanjian Dwi Kewarganegaraan juga lahir karena presepsi orang pribumi tentang Tionghoa lokal yang tidak dianggap berasimilasi. Pada tanggal 22 April 1955, perjanjian Dwi Kewarganegaraan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Rakyat Cina dan pemerintah Indonesia. Kemudian perjanjian ini dijadikan Undang-Undang No.2 Tahun 1958 pada tanggal 27 Januari 1958.[38] Undang-Undang ini mensyaratkan bahwa penolakan Kewarganegaraan Cina harus dilakukan di Pengadilan Negeri di Indonesia, atau di kedutaan-kedutaan atau konsulat-konsulat Indonesia untuk orag Tionghoa yang ada di luar negeri, untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan ganda sebelum tanggal 20 Januari 1960, harus menolat kewarganegaraan Cina atau Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 20 Jahuari 1960-20 januari 1962. [39]

Diberlakukannya perjanjian Dwi Kewarganegaraan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan partai-partai politik pada saat itu. Partai yang mendukung diberlakukannya Undang-Undang ini menilai bahwa perjanjian ini merupakan cara cepat dalam menyelesaikan

[38] Departemen Dalam Negeri, *Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Kewarganegaraan, Asimilasi dan Orang Asing*, 1978.
[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan kewarganegaraan ganda masyarakat Tionghoa. Sementara itu partai oposisi yang menentang berpendapat bahwa dengan berlakunya perjanjian tersebut maka dikhawatirkan akan semakin banyak orang asing yang menetap di Indonesia, khususnya Jawa.

Kondisi diplomasi yang semakin kritis dan adanya tuntutan dari pemuda dan mahasiswa, maka melalui sidang darurat 9 Oktober 1967, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membekukan hubungan diplomatik dengan RRC.[40] Hal ini kemudian menyebabkan pemerintah memutuskan perjanjian Dwi Kewarganegaraan secara sepihak. Pemerintah Soeharto memiliki pandangan yang sama dengan partai oposisi di jaman Soekarno. Pemerintah Orba menilai dengan diberlakukan perjanjian tersebut dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak yang orang tuanya memilih kewarganegaraan Cina untuk menjadi warga Negara Indonesia sampai anak-anak tersebut mencapai umur 18 tahun, tanpa penyaringan secara ketat dari pemerintah.selain itu pemerintah juga berpendapat dengan diberlakukannya perjanjian itu akan memberikan suatu perlakukan khusus kepada golongan tertentu sehingga akan memperlambat proses asimilasi. [41]

Dengan dihapusnya Perjanjian Dwi Kewarganegaraan maka setiap anak dari orang tua yang berkewarganegaraan Cina, jika memilih kewarganegaraan Indonesia harus melalui proses naturalisasi, berdasarkan UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. UU tersebut menyebutkan bagi

[40] Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, 981.
[41] Suryadinata, *Dilema Minoritas*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak yang orang tuanya telah memilih kewarganegaraan Indonesia atau salah satu orang tuanya merupakan warga Negara Indonesia maka anak-anak mereka tetap menjadi warga Negara Indonesia.[42]

Peristiwa-peristiwa rasial memang tidak terjadi sekali atau dua kali. Oleh karena itu baik pemerintah maupun pihak etnis Tionghoa merasa perlu mengubah presepsi negative di kalangan pribumi dengan menjalankan program asimilasi. Ide mengenai asimilasi sendiri menjadi topik yang hangat diperbincangkan ketika pertemuan mengenai perubahan nama-nama bagi etnis Tionghoa pada 22 Februari 1960. Pertemuan ini dihadiri oleh menteri Kesejahteraan Sosial, Moeljadi Djojomartono dan 12 pemuda peranakan dan hadir pula Let.Kol Kaswadi. Sebelumnya pada 29 Desember 1959 Moeljadi juga pernah mengadakan pidato serupa di Temanggung.[43]

Moeljadi menyarankan bahwa Etnis Tionghoa harus mengganti nama mereka, misalnya Tan menjadi Tanoyo, Ong menjadi Onggowarsito dan sebagainya. Anjuran Menteri Sosial ini menuai beragam tanggapan ada yang 100 % setuju, ada yang menentang dan ada pula yang netral.[44] Setahun setelah diadakannya pertemuan tersebut, pada tahun 1961 pemerintahan Soekarno menerapkan kebijakan mengenai perubahan nama bagi etnis Tionghoa melalui UU No.4 Tahun 1961.[45] Kebijakan ini mengharuskan masyarakat Tionghoa yang mengganti nama Tionghoanya

[42] Ibid., 129.
[43] Panitia Penyuluhan Asimilasi Pusat, *Lahirnya Konsepsi Asimilasi*, 19.
[44] Junus Jahja, *Ganti Nama*, 5.
[45] Departemen Dalam Negeri, *Himpunan Peraturan Perundangan*, 1978.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus melapor ke pengadilan dan diumumkan di berita Negara. Karena prosesnya rumit maka kebijakan ini tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan pemerintah saat itu.[46]

Di pihak Tionghoa, setelah Indonesia merdeka mereka juga mulai memikirkan jalan keluar yang terbaik bagi keadaan yang terjadi pada kalangan etnis Tionghoa. Perdebatan mengenai jalan keluar yang dipilih apakah itu asimilasi atau integasi. Perbedaan yang terjadi di tubuh etnis Tionghoa menjadi dua bagian mengenai jalan yang harus ditempuh etnis sebenarnya memiliki dasar yang sama yaitu memperjuangkan perwujudan cita-cita nasional, dimana setiap orang merupakan warga Negara Indonesia sesungguhnya, tanpa memandang ras, agama, dan warna kulit. Di kubu ini terpecah menjadi golongan yang mendukung integrasi dan golongan yang mendukung asimilasi.

Golongan integrasi di bawah pimpinan Siauw Giok Tjhan. Siauw berpendapat bahwa permasalahan rasial yang terdapat di Indonesia khususnya Jawa akan dapat diselesaikan jika tercipta masyarakat tanpa adanya pemerasan atas golongan dan penghisapan manusia atas manusia.[47] Hal tersebut berarti bahwa ia ingin membangun bangsa dimana adanya kesamaan hak dan kewajiban negaranya tanpa mempermasalahkan asal usul. Golongan integrasi menginginkan diakuinya golongan Peranakan ras Tionghoa sebagai salah satu suku Indonesia sehingga keetnisannya tetap

[46] Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, 85.
[47] Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, 722

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertahankan.[48] Golongan pendukung integrasi menginginkan penyebutan suku Tionghoa untuk mencapai tujuan mereka, agar bisa hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat pribumi. Mereka tidak menuntut untuk diberikan wilayah kepada kelompok minoritas ini.

Kelompok yang mendukung asimilasi adalah orang-orang yang sebagian merupakan mantan anggota Baperki. Mereka keluar karena berpeda pandangan dengan ketua Baperki yaitu Siauw Giok Tjhan. Selain perbedaan pandangan antara anggota Baperki, alasan lainnya adalah arah ideologi Baperki yang kemudian lebih condong ke komunis. Asimilasi sendiri memiliki arti proses penyatuan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan pernyataan-pernyataan kebudayaan yang berbeda-beda menjadi satu kebulatan sosiologis harmonis dan bermakna yaitu dalam hal ini dinamakan bangsa Indonesia.[49] Oleh sebab itu, untuk menjadi orang Indonesia secara total, orang Tionghoa yang berada di Jawa harus dilebur ke dalam penduduk asli (pribumi) sehingga kaum minoritas Tionghoa tidak lagi akan menjadi kelompok tersendiri.[50]

Etnis Tionghoa yang mendukung arah asimilasi sebagai jalan dalam permasalahan yang dihadapi oleh mereka merupakan para generasi muda Tionghoa yang berpendidikan dan khwatir akan sikap keeksklusifan etnis Tionghoa di tengah masyarakat Jawa. Pada 24 Maret 1960, dikeluarkan suatu statement asimilasi yang dicetuskan oleh sepuluh orang

[48] *Lahirnya Konsepsi Asimilasi*, 20.
[49] Ibid., 20-21.
[50] Suryadinata, *Dilema Minoritas*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tionghoa Peranakan yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 10.[51] Dalam pernyataan tersebut terdapat pendapat yang tegas bahwa jalan satu-satunya untuk memecahkan masalah minoritas ialah asimilasi disegala lapangan.[52]

Statemen "Menuju Asimilasi Yang Wajar" kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Piagam Asimilasi pada acara seminar kesadaran Nasional yang bertempat di Bandungan (Ambarawa) pada tanggal 13-15 januari 1961. Dalam Piagam tersebut sebanyak 30 orang Tionghoa Peranakan dan beberapa Pribumi yang berasal dari berbagai daerah di Jawa, tercatat turut dalam menandatangi Piagam Asimilasi.[53]

Selain mencetuskan Piagam asimilasi, golongan penganut asimilasidan pemerintah juga mendirikan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) pada tahun 1963.[54] Pembentukan LPKB dilakukan melalui Musyawarah Asimilasi tahun 1963 dengan anggotanya berasal dari WNI pendukung asimilasi. [55] Lembaga ini berdiri dengan tujuan untuk menyebarkan ide dan metode asimilasi serta membersihkan citra etnis Tionghoa yang identik dengan komunis. Hal ini dikarenakan gerakan Baperki yang condong ke komunis semenjak PKI turut dalam mendukung kegiatan-kegiatan Baperki dalam memperjuangkan hak-hak etnis Tionghoa di Jawa.

---

[51] Star Weekly "Piagam Asimilasi" 21 Djanuari 1961, 47.
[52] Ibid., 47.
[53] Ibid., 47.
[54] Junus, *Catatan Seorang WNI*, 44.
[55] Departemen Penerangan R.I, *Asimilasi Dalam Rangka Pembinan Kesatuan Bangsa*, 1964, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awalnya LPKB hampir tidak bisa menandingi Baperki karena kedekatan yang dimiliki Baperki dengan persiden Soekarno. Kepemimpina LPKB dipegang oleh kapten laut K.Sindhunata, seorang Tionghoa peranakan beragama Katholik.[56] Untuk menyelamatkan LPKB dari serangan Baperki, pemerintah RI menjadikan LPKB menjadi suatu badan resmi Negara di bawah Menko Hubungan dengan Rakyat yakni Dr.Ruslan Abdulghani. LPKB selaku usaha gerakan asimilasi/pembauran dalam kenyataannya cukup gigih menyebarluaskan cita-citanya. Dalam periode 1963-1965, ide asimilasi berhasil menarik dukungan di kalangan WNI non-komunis. Semakin diyakini bahwa penyelesaian masalah Cina di Jawa hanya dapat dilakukan dengan politik asimilasi tanpa eksklusivisme atau persukuan-persukuan baru.[57]

Setelah pemerintahan Presiden Soekarno berakhir dan diganti oleh pemerintah Orde baru, LPKB membantu pemerintah Orde baru dalam mengatasi masalah Tionghoa di Jawa. Dengan dukungan militer, LPKB memainkan peranan penting dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah Tionghoa. Pada tahun 1967, LPKB dibubarkan kemudian pemerintah membentuk Badan Komunikasi (BAKOM) di bawah naungan Departemen Dalam Negeri RI. Tugas BAKOM sama seperti LPKB yakni menekankan asimilasi total.[58] Sementara itu, guna meneruskan kebijakan asimilasi yang telah dimulai oleh pemerintahan Soekarno, pemerintah Orba mengeluarkan sejumlah

[56] Suryadinata, *Dilema Minoritas*, 69
[57] Junus Jahja, *Islam Di Mata WNI*, 49-50.
[58] Suryadinata, *Negara Dan Etnis Tionghoa*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan yang berkaitan dengan hal itu yakni Inpres No.14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat Istiadat Tionghoa (yang sekarang telah dihapuskan), Keppres No.127/U/Kep/1966 yang diikuti oleh intruksi Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1969 tentang ganti nama bagi orang Tionghoa di Jawa.

Kebijakan ganti nama dimaksudkan untuk meleburkan masyarakat Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi oleh pemerintahan Soekarno tetapi langkah ini gagal. Kebijakan ganti nama baru aktual pada masa pemerintahan Orde baru di bawah rezim Soeharto melalui Keputusan Presedium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966. Dengan dikeluarkannya Keppres ini, maka seorang Tionghoa dapat mengganti nama mereka di kabupaten atau kantor Walikota. Peraturan ini berlaku hingga 1 Maret 1968.Apabila ada seorang Tionghoa yang ingin mengganti namanya melewati batas waktu yang telah ditentukan maka ia harus menjalani proses seperti yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1961.

Pemeritah berpendapat bahwa ganti nama bagi etnis Tionghoa merupakan strategi yang paling komprehensif untuk mensukseskan proses asimilasi serta mengubah identitas Tionghoa menjadi masyarakat pribumi. Sebagai contoh nama Tionghoa Ho Tian An diganti menjadi Aan Sutisna, Tan Lip Siang menjadi Syarif Tanudjaja, Oey Tjeng Hien menjadi Abdul Karim Oey, Lauw Chuan Tho menjadi Junus Jahja dan sebagainya. Meskipun peratutan ganti nama sudah ada sejak pemerintahan Soekarno dan dilanjutkan kembali pada masa Soeharto tetapi pemerintah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewajibkannya. Beberapa etnis Tionghoa di Jawa tetap mempertahankan nama asli mereka, seperti Ong Hok Ham, Yap Thiam Hien dan lain-lain. Tetapi tampaknya generasi muda Tioghoa, terutama mereka yang lahir setelah Gestapu kemungkinan besar telah menggunakan nama yang terdengan seperti nama Indonesia. Namun perlu dicatat bahwa etnis Tionghoa asing (mereka yang buka warga Negara Indonesia) tidak diperbolehkan mengubah nama Tionghoa mereka dengan nama Indonesia atau Jawa.[59]

Di samping cara-cara melakukan asimilasi seperti yang dikemukakan diatas, ada pula yang beranggapan bahwa memeluk agama Islam, sebagai agama dari mayoritas orang Indonesia khususnya Jawa juga merupakan salah satu cara asimilasi yang efektif. Oleh karena itu, mulai periode 1970-an cukup banyak orang Tionghoa di Jawa yang memeluk agama Islam termasuk tokoh-tokoh cendekiawan dan pengusaha Tionghoa di Jawa. Misalnya seperti Verawati Sadiqin yang merupakan keturunan Tionghoa yang kemudian memeluk Islam dan juga menikah dengan seorang laki-laki asli pribumi bernama Fajrin. Setelah memasuki era reformasi, segala bentuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang dilakukan pemerintah Orde baru telah dicabut dan etnis ini dibebaskan dalam segala bidang baik sosial, budaya, politik maupun agama.

[59] Suryadinata, *Etnis Tionghoa*, 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tokoh-Tokoh Pengagas Asimilasi

1. Ong Hok Ham

Ong Hok Ham merupakan sejarawan, penulis dan dosen FSUI. Beliau lahir pada tahun 1933 di Surabaya Jawa Timur. Ia sangat mendalami kebudayaan Jawa. Ia memperoleh gelar sarjana Sastra jurusan Sejarah dari FSUI dengan skripsi berjudul "Runtuhnya Hindia Belanda Indonesia dari 1940-Maret 1942". Pada tahun 1968 beliau melanjutkan studi bidang sejarah di Yale University, Amerika Serikat. Tahun 1975 ia memperoleh gelar Ph.D. Ong aktif menulis di surat kabar dan majalah *Star Weekly*, Tempo, Prisma, Kompas dan sebagainya.[60]

Ong Hok Ham banyak menulis mengenai asimilasi dan menjadi salah satu penandatangan Piagam Asimilasi di Bandungan Ambarawa. Ong berpendapat bahwa golongan minoritas peranakan tentu mempertahankan kedudukannya sebagai suatu minoritas. Mereka dapat menjadi loyal terhadap Negara, pendeknya menjadi warganegara Indonesia yang baik tetapi masih mempertahankan cara-cara hidup mereka sendiri seperti tradisi-tradisi Imlek, adat istiadat dan lain-lain. Dalam keadaan ini menurut Ong kemungkinan konflik-konflik dengan mayoritas dapat dihindari dengan baik. Akan tetapi jika timbul

[60] Sam Setyautama, *Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa*, 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan krisis, entah krisis ekonomi, politik atau lainnya maka konflik-konflik akan terjadi. Diskiminasi juga tidak akan dapat dihilangkan sama sekali.[61] Satu-satunya jalan menurut Ong ialah asimilasi atau peleburan seratus persen menjadi orang Indonesia asli.

Ia juga menjadi anggota LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa). Ong memiliki hobi memasak dan terkenal kuat suka minum anggur. Karena hobinya ini tahun 2001 Ong terkena stroke di Yogyakarta sehingga ia terpaksa mengenakan kursi roda. Ia pensiun dari FSUI dan tidak sempat diangkat menjadi Guru Besar.[62]

2. K.Sindhunata (1933-2005)

Kristoforus Sindhunata lahir dengan nama Ong Tjong Hay di Batavia 20 Maret 1933. Beliau merupakan seorang tokoh pembauran Indonesia. Namanya tidak bisa dipisahkan dari gerakan Asimilasi atau pembauran keturunan Tionghoa. Ia belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mengikuti pendidikan wajib militer ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) pada tahun 1962 dan terakhir berpangkat mayor Angkatan Laut. Beliau pernah menjabat sebagai ketua BAKOM-PKB yang didirikan oleh pemerintah pada 31 Desember 1977. Organisasi ini merupakan suatu badan semi-pemerintah atau panitia kerja/*task force* di bidang pembauran bangsa.[63] Sindhunata aktif berorganisasi dan pernah menjadi wakil ketua

[61] Ong Hok Ham "Asimilasi Golongan peranakan" dalam *Star Weekly*, 27 Februari 1960.
[62] Ibid., 292.
[63] Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia). Ia juga turut mendirikan dan menjadi ketua Yayasan Trisakti.

Dalam aktivitasnya, Sindhunata mengatakan bahwa pembauran di kalangan etnis Tionghoa dengan pribumi harus dipercepat agar tidak ada lagi hal-hal yang eksplosif dalam masyarakat. Salah satu upaya pembauran/ asimilasi yang paling tepat dan cepat menurut Sindhu adalah melalui perkawinan karena selain saling mencintai prosesnya wajar dan alami. Sindhunata melihat kesempatan bahwa menjadi militer sebagai proses untuk menanamkan semangat nasionalisme yang paling kuat. Menurut Sindunata terdapat beberapa pemikiran dasar yang perlu diperhatikan setelah pemerintah Orde baru melaksanakan politik pembauran bangsa yaitu[64]

a. Sebagai kebijakan strategis politik pembauran bangsa tetap relevan dan harus lebih konsisten dilaksanakan secara integral di segala bidang kehidupan bangsa dan Negara. Artinya, seluruh unsur kebhinnekaan bangsa (suku, ras, budaya dan agama) secara konsisten harus diberi kesempatan yang sama tanpa pembedaan mayoritas dan minoritas.
b. Manifesto loyalitas Nasional tau cinta tanah air perlu menjiwai sikap dan tingkah laku setiap orang Tionghoa dimanapun dan dalam bidang kehidupan apapun dalam bentuk yang beranekaragam, termasuk sebagai pengusaha. Untuk itu perlu

[64] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 121-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuka dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka agar bisa berperan penuh khususnya di bidang pemerintahan dan politik.

c. Dalam rangka integrasi sosial dan budaya, agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat pribumi jelas sangat membantu proses akseptasi (penerimaan) orang-orang Tionghoa yang beragama Islam di lingkungan umat Islam sendiri sampai tingkat akar rumput (*grass root)*. Namun hal ini juga berlaku bagi penganut-penganut agama lain di lingkungan umatnya masing-masing.

Sindhu aktif dalam mengembangkan hubungan persahabatan antar Negara sehingga di tahun 1983 dianugerahi medali kehormatan Perancis *Chevalier de I'Ordre National du Merite* oleh pemerintah Perancis. Beliau juga pernah menjadi anggota majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional, namun pada Januari 2001 ia mengundurkan diri karena merasa partai itu tidak sejalan dengan reformasi yang dicetuskan rakyat Indonesia pada 1998. Ia meninggal dunia di Jakarta pada 16 Agustus 2005.[65]

3. PK Ojong

Mr. Auwjong Peng Koen yang lebih dikenal dengan nama P.K.Ojong SH lahir pada 25 Juli 1920 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Beliau merupakan tokoh pembauran dan kaum intelektual Indonesia di

[65] http://www.tionghoa.infi/kristoforus-sindhunata/ diaskes pada 10 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa lampau. Beliau memulai karir menjadi guru dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar Keng PO di tahun 1946 dan juga mengasuh mingguan *Star Weekly* yang pembacanya semula hanya keturunan Tionghoa. Di kemudian hari mingguan *Star Weekly* mencakup segenap lapisan masyarakat Indonesia. Beliau juga pendiri salah satu surat kabar yang sampai sekarang masih tetap eksis yaitu Harian Kompas.[66]

Di zaman Indonesia merdeka PK Ojong baru meraih gelar sarjana Hukum di Universitas Indonesia. Ojong juga sebagai konseptor utama statemen asimilasi di kalangan etnis Tionghoa pada tahun 1960. Beliau aktif mengumpulkan 9 tanda tangan dari tokoh-tokoh lain yang mendukung proses asimilasi hingga selanjutnya dikenal dengan panggilan 10 tokoh atau panitia 10.[67]

4. H. Abdul Karim Oey (1905-1988)

Krim Oey atau yang dikenal dengan nama Haji Abdul Karim Oey lahir pada 6 Juni 1905 di Padang Panjang dengan nama asli Oey Tjeng Hien.[68] Beliau masuk Islam pada tahun 1926. Sesuatu yang sangat langka pada saat itu melihat etnis Tionghoa memeluk agama Islam, sehingga keberadaan Karim Oei menjadi sorotan masyarakat baik dari kalangan pribumi maupun etnis Tionghoa itu sendiri.

Keputusan Karim untuk menjadi Muslim mendapat banyak cemoohan dari kalangan etnis Tionghoa. Hal ini dikarenakan bagi

[66] Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 97.
[67] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 401.
[68] Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang Tonghoa sipapun yang menjadi Muslim dianggap akan turun derajat sosialnya di mata etnis Tionghoa yang masih memegang teguh ajaran agama atau keyakinan dari para leluhur mereka. Selain itu, orang Tionghoa yang menjadi Muslim dianggap oleh orang Tionghoa lainnya sebagai *inlander*,[69] dimana pada saat itu merupakan kedudukan tingkat terendah dalam strata sosial di masyarakat pada masa itu. Bagi mereka yang berpendirian teguh seperti Karim tidak merisaukan permasalahan tersebut bahkan ia merasa bersyukur dengan dirinya menjadi seorang muslim. Dengan hal ini maka beliau dapat menyatu dengan masyarakat luas terutama pribumi yang mayoritas menganut agama Islam.

Karim merupakan lulusan dari *Holland Chinesceh School* (HCS), SD tujuh tahun dengan bahasa Belanda untuk keturunan Tionghoa pada masa itu.[70] Haji Abdul Karim juga sebagai businessmen yang sukses. Dalam dunai bisnis ia dikenal sebagai seorang yang ulet dan memegang jabatan penting di berbagai perusahaan, antara lain Komisaris Utama Bank Central Asia (BCA), Direktur utama Asuransi Central Asia, Direktur PT Mega, Direktur Utama Pabrik Kaoe Aseli 777 dan Direktur Utama Sumber Begawan Mas.[71] Belaiau juga pernah menjadi anggota DPR antara 1956-1959

[69] Inlander merupakan sebutan mengejek oleh orang Belanda untuk masyarakay asli Indonesia (pribumi) pada masa penjajahan Belanda. http://kbbi.co.id diaskes pada 8 Desember 2017.
[70] Tim yayasan Rahmat Semesta, *Dakwah dan Asimilasi: Lahirnya Seorang Muslim dan Aneka Sambutan* (Jakarta: Yayasan Rahmat Semesta, 1979), 62.
[71] Junus Jahja, *Non-Pri Di Mata Pribumi* (Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mewakili minoritas Tionghoa. Kemudian ia juga aktif dalam partai Masyumi, serta menjadi anggota Konstituante.[72]

Dalam hal dakwah Islam beliau aktif di Muhammadiyah dan menjadi pendiri organisasi dakwah untuk kalangan etnis Tionghoa yaitu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang didirikan pada tahun 1961. Beliau juga pernah menjadi anggota Majelis 'Ulama Indonesia (MUI) dan pimpinan Harian panitia Penyelenggaraan pembangunan masjid Istiqlal pada 1967-1974. Tidak hanya menjadi salah satu tokoh pembauran untuk masyarakat luas, Oey juga menerapkan konsep pembauran di lingkungan keluarganya, putrinya bernama Tjioe Nio menikah dengan seorang dokter asal Indonesia asli (pribumi). Putrinya yang kedua, Eng Lie (Iriani) menikah dengan Ir. Macyar Helmy Nasution, putra seorang mubaligh kenamaan Yunan Helmy Nasution. Karim Oei meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 1988 di usia 84 tahun yang disebabkan penyakit komplikasi.[73]

[72] Junus Jahja, *Peranakan Idealis: Dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), 22.
[73] Ibid., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KONTRIBUSI H.JUNUS JAHJA DALAM PROSES ASIMILASI ANTARA ETNIS TIONGHOA DAN PRIBUMI DI JAWA TAHUN 1960-2011

A. Gagasan Konsep Asimilasi H. Junus Jahja

Pada masa pra-kemerdekaan, orang-orang Tionghoa di Jawa secara sosial mendapatkan posisi yang jauh lebih baik daripada masyarakat pribumi. Etnis Tionghoa menguasai perdagangan dan di hadapan hukum, mereka mendapat kedudukan yang lebih tinggi daripada pribumi.[1] Pemerintah Belanda menerapkan politik *Devide Et Impera* atau politik memecah belah sehingga penduduk di Indonesia, termasuk Jawa terbagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing yang mayoritas adalah masyarakat Tionghoa dan golongan bawah atau inlanders yang merupakan penduduk pribumi.[2] Kondisi demikian membuat etnis Tionghoa cenderung eksklusif dan tidak berbaur dengan masyarakat setempat. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi terjadinya kecemburuan sosial antara etnis Tionghoa dan pribumi sehingga timbul apa yang dikatakan sebagai "masalah Cina".

H. Junus Jahja sebagai seorang tokoh dari keturunan Tionggoa peranakan berpendapat bahwa salah satu cara dalam penyelesaian masalah Cina yaitu melalui asimilasi atau pembauran ke dalam masyarakat mayoritas (pribumi). Menurut Junus Asimilasi adalah menghilangkan

[1] Suhardi Ruman "Tionghoa Warga Negara Indonesia" dalam Sinergi, Edisi Ke-20/Tahun II/Juni 2000, 20.
[2] Junus Jahja, *Pri-Nonpri Dan Konvensi Cina Sedunia* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1981), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identifikasi sebagai golongan minoritas.[3] Asimilasi adalah proses penyatu-gabungan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan pernyataan-pernyataan kebudayaan yang berbeda-beda menjadi satu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna yaitu dalam hal ini dinamakan bangsa (Nation) Indonesia. Asimilasi berarti pula bahwa eksklusifisme-seketurunan (hidup mengelompok) atas dasar ras/etnisitas yang merupakan warisan masa lampau berangsur-angsur dapat dihapuskan.[4]

Junus Jahja mulai tertarik terhadap penyelesaian-penyelesaian masalah Cina ketika ia masih menjadi mahasiswa di NEH Rotterdam Belanda. Pada tahun 1950-an, Junus bersama kawan-kawannya mulai mencetuskan ide asimilasi. Meskipun pada saat itu tentunya belum lazim disebut sebagai asimilasi. [5] Junus mempraktekan ide tersebut secara langsung dengan melakukan pergaulan campur antara pribumi dan nonpribumi secara intensif dan melembaga tanpa membeda-bedakan asal usul.[6] Di awal tahun 1950-an sekitar 500 mahasiswa atau pelajar Indonesia keturunan Tionghoa yang bermukim di Nedherland untuk menuntut ilmu diharuskan memilih kewarganegaraannya. Mereka harus memilih menjadi warganegara Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan, Indonesia atau Belanda. Pada saat itu 90 % mahasiswa tersebut memilih kewarganegaraan Indonesia. Sebab nation buildingnya tidak mengenal wawasan primordial

[3] Junus Jahja, *Masalah Tionghoa Indonesia: Asimilasi Versus Intergasi* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1999), 26-27.
[4] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 381.
[5] Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 9.
[6] Jahja, *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti etnisitas, ras dan sebagainya tetapi berdasar ikatan-ikatan umum dan luas yang mencakup segenap unsur yaitu ikatan kebangsaan yang menyeluruh yang sekarang dikenal dengan wawasan kebangsaan.[7] Secara tradisional mereka terhimpun dalam perkumpulan mahasiswa keturunan Cina yaitu Chung Hua Hui yang telah berdiri sejak 1928. Chung Hua Hui berarti perkumpulan khusus keturunan Cina di Nederland. Perkumpulan ini berhimpun berdasar etnisitas ke-Cina-an (Chineseness).

Junus yang tergabung dalam perkumpulan Chung Hua Hui menolak pergaulan atau cara berhimpun berdasarkan etnisitas, persamaan ras dan ikatan darah. Menurut Junus tidak benar jika setelah menjadi warganegara tertentu berhimpun atas dasar etnisitas, sebab jika masih merasa sebagai Cina (karena tetap dalam perkumpulan Chung Hua Hui) maka akan timbul keragu-raguan di kalangan penduduk asli Negara-negara yang bersangkutan, khususnya dalam hal ini adalah Indonesia asli (pribumi).[8] Setelah berstatus sebagai WNI (sebutan orang keturunan Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia) maka harus konsekuen keluar dari kelompok etniknya kemudian bergaul dan membaur ke kalangan pribumi.[9] Karena sebab itulah Junus yang menjabat sebagai ketua Kwan Chung yaitu CHH cabang Rotterdam menginginkan perkumpulan ini dibubarkan.[10] Junus bercita-cita untuk bersatu dalam ikatan berdasar ke-Indonesia-an.

---

[7] Jahja, *Pri-Nonpri*, 1.
[8] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 217.
[9] Jahja, *Kisah-Kisah Saudara Baru*, 184.
[10] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja* 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para anggota Chung Hua Hui yang menolak organisasi ini dianjurkan untuk bergabung dengan organisasi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) yang berwawasan kebangsaan (Sumpah Pemuda[11]). PPI didirikan pada tahun 1951 yang anggotanya merupakan gabungan dari kelompok-kelompok mahasiswa eks-beasiswa Malino, eks-Tentara Pelajar (TP), eks-CM (Corp Mahasiswa).[12] Dengan tujuan untuk menghadapi anggota-anggota maupun suara-suara di kalangan keturunan Tionghoa di Nederland dan Indonesia yang masih gandrung untuk mempunyai wadah semacam CHH dengan dalih memelihara kebudayaan leluhur Cina dan lain-lain maka mereka yang mengambil prakarsa membubarkan CHH terpaksa bersuara keras dan tegas. Bahkan mereka menerbitkan sebuah brosur "De Noodzakelijke Ontbinding Van de Chung Huia Hui (CHH harus dibubarkan)" dengan jelas dikemukanan agar keturunan Tionghoa harus konsekuen dan tegas. Karena yang paling utama bagi warga Negara Republik Indonesia yang baru selanjutnya ialah kepentingan Indonesia.[13]

Dalam suatu pidato pada tahun 1952, Junus yang saat itu menjabat sebagai ketua CHH Rotterdam Belanda menyampaikan gagasannya untuk

[11] Sumpah Pemuda merupakan proklamasi Kebangsaan dan lahirlah bangsa baru yang bernama Indonesia. Organisasi-organisasi mahasiswa, pelajar dan pemuda mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda yakni "Satu Nusa, Satu Bangsadan Satu Bahasa: Indonesia". Pada Kongres Pemuda Indonesia ke II pada 28 Oktober 1928 itu diperkenalkan pula lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dan bendera Sang Saka Merah Putih. Sumpah Pemuda ini kemudian menjadi landasan pokok dan semen pengikat kebangsaan Indonesia yang meratakan jalan bagi proklamasi Kemerdekaan 1945 dan berdirinya Negara Republik Indonesia. Junus Jahja, *Achong Kemana* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1999), 2.
[12] Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 93.
[13] Ibid., 94-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membubarkan Chung Hua Hui. Gagasan ini bertolak dari pemikiran beliau bersama pemrakarsa pembubaran CHH sebagai berikut:[14]

1. Memilih kewarganegaraan Indonesia secara sukarela bererti: sumpah kesetiaan pada Indonesia
2. Para akademisi yang selalu menginginkan bersikap netral dalam persoalan-persoalan batiniah dan moral. Oleh karena itu mereka tidak mampu berperan sebagai pemimpin bagi golongan Indo-Tionghoa baik di Belanda maupun Indonesia.
3. Suatu minoritas dapat dimanfaatkan oleh tanah leluhurnya sebagai alat politik. Dengan demikian minoritas menjadi alat belaka untuk tujuan tertentu.
4. Adanya semacam status kewarganegaraan dalam Chung Hua Hui hendaknya diselesaikan selekasya agar para anggota dapat mengadakan reorientasi dan secara politis berpisah satu sama lain.

Untuk membubarkan CHH pada saat itu diperlukan 2/3 jumlah suara. Jumlah ini tidak dapat tercapai, tetapi anggota yang pro menginginkan pembubaran CHH secara masal keluar dari keanggotan CHH serta menyatakan masuk PPI (Persatuan Pelajar Indonesia) sehingga CHH akhirnya mengalami kemunduran. Usaha membubarkan perkumpulan yang eksklusif keturunan Tionghoa dan bergabungnya ahasiswa Keturunan Tionghoa dengan pribumi di Nederland yang

[14] Wahono, *70 Tahun*, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergabung dalam PPI ini dianggap sebagai gong pertama yang mencanangkan awal gerakan asimilasi atau pembauran.[15]

Di tahun 1959 Junus Jahja bersama dengan kawan-kawan seperjuangannya di Belanda kembali ke tanah air. Junus terkejut melihat adanya neo-Chung Hua Hui bernama Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia). Baperki ini didirikan pada tahun 1954 dengan tujuan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam soal-soal kewarganegaraan bagi WNI keturunan Tionghoa. Dalam mencapai tujuannya di bidang kewarganegaraan, Baperki menyokong integrasi golongan WNI keturunan Tionghoa yaitu diterimanya mereka sebagai suatu kelompok dalam masyarakat Indonesia khusunya Jawa.[16] Menurut Junus, pada hakikatnya Baperki didirikan untuk melanjutkan hidup berkelompok sebagai Cina, asal Cina atau Peranakan Cina yang jelas-jelas ini menurutnya menyalahi Sumpah Pemuda 1928. Dalam perkembangannya Baperki secara perlahan berhaluan politik dan condong ke kiri (komunis) sehingga menyebabkan beberapa tokoh yang turut mendirikan Baperki yaitu PK Ojong keluar dari Baperki.

PK Ojong dan kader-kader Katolik seetnis Tionghoa bersama pula Junus Jahja yang merupakan pendukung gagasan asimilasi bergabung menjadi satu dan menggempur Baperki. Mereka kemudian mendapat dukungan dari Angkatan Darat. Sekalipun gagasan asimilasi telah dikemukakan jauh-jauh hari sebelumnya akan tetapi gerakan asimilasi di

[15] Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 95.
[16] Charles A.Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan WNI Tionghoa peranakan baru aktual di tahun 1960 dalam suasana kekacauan yang ditimbulkan oleh diberlakukannya larangan terhadap perdagangan eceran oleh orang-orang asing di wilayah pedesaan dan pelaksanaan perjanjian kewarganegaraan, yang kedua-duanya memberikan alasan kepada golongan WNI keturunan Tionghoa untuk merenungkan makna kewarganegaraan Indonesia. Kelompok Asimilasi berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk memecahkan masalah minoritas adalah mengusahakan lenyapnya golongan Tionghoa sebagai suatu kelompok sosial budaya yang terpisah.[17]

B. Terbentuknya Piagam Asimilasi

Gerakan Asimilasi mulai berkembang dan aktual di awal tahun 1960-an. Junus jahja yang ketika itu baru pulang dari Belanda sering berkunjung ke kantor redaksi *Star Weekly* di Jalan Pintu Besar Jakarta. Di sana beliau membaca Koran, majalah dan sering bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh yang ia jumpai seperti Pk Ojong yang merupakan pengasuh majalah ini. Dari sinilah kemudian gerakan asimilasi atau pembauran mulai dikembangkan.

Pada saat itu Junus bersama PK Ojong mendapat dukungan dari Letkol Soeparman dari SUAD I Markas Besar Angkatan Darat sehingga kemudian mereka mendirikan panitia penyuluhan Asimilasi yang berkantor di gedung Daya Murni (Pemuda Katolik Etnis Cina) sebelah

[17] Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kathedral Jakarta. Pada saat pendirian panitia penyuluhan asimilasi terdapat pula tokoh-tokoh muda yang juga mendukung gagasan asimilasi ini seperti Ong Tjong Hay yang kemudian dikenal sebagai K. Sindhunata, Lo Siang Hien, Ang Liang Tjay Ong Hok Ham dan sebagainya. Sehingga pada 24 Maret 1960 para tokoh dari keturunan Tionghoa Peranakan yang mendukung penyelesaian masalah Cina melalui jalur asimilasi mengeluarkan statement "Menuju Asimilasi Yang Wajar".

Konseptor utama dari statement ini ialah PK Ojong. Ia mengumpulkan 9 tanda tangan dari tokoh-tokoh pendukung asimilasi yang kemudian dikenal dengan penggilan "10 tokoh" atau panitia 10 orang. Tokoh-tokoh tersebut adalah[18]

a. Mr.Tjung Tin Yan
b. Injo Beng Goat
c. Tjia Dji Siong
d. Drs. Lo Siang Hien
e. Ir.Tan Bian Seng
f. Ong Hok Ham
g. Drs Lauw Chuan Tho (Junus Jahja)
h. Drs. Tantekhian
i. Drs.Kwee Hwat Djien
j. PK Ojong

Dalam stetement asimilasi menganjurkan agar keturunan Tionghoa meninggalkan usaha-usaha yang bersifat eksklusif, tercatat antara lain[19]

[18] Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 98.
[19] *Piagam Asimilasi*, Star Weekly No.786-21 Januari 1961, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Masalah minoritas hanya dapat diselesaikan dengan jalan asimilasi sukarela dalam segala lapangan secara aktif dan bebas.
b. Tidak dibenarkan tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan yang menghambat proses asimilasi tersebut secara kunstmatig (dibuat-buat). Sebaliknya juga tidak dibenarkan tindakan-tindakan yang memaksakan asimilasi itu.

Setelah terbentuk panitia 10 maka gerakan asimilasi dilanjutkan dengan mengadakan Seminar Kesadaran Nasional di Bandungan Ambarawa pada tanggal 13-15 januari 1961. Seminar tersebut menghasilkan Piagam Asimilasi yang ditandatangani 30 tokoh dari keturunan Tionghoa dari pulau Jawa.[20] Seminar inilah yang merumuskan gagasan asimilasi keturunan Tionghoa. Piagam tersebut menekankan bahwa syarat untuk mencapai suatu bangsa dengan masyarakat yang adil dan makmur serta Negara yang kuat dan penuh dinamika sehingga dapat menjalankan peranan wajar dalam dunia internasional sesuai dengan panggilan zaman adalah dengan proses asimilasi.[21]

Asimilasi dapat dilakukan melalui bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan juga agama. Tampaknya dalam penyelesaian masalah Cina, Junus memilih melalui jalur agama. Menurut Junus proses asimilasi akan berjalan dengan baik apabila masyarakat minoritas memeluk agama

[20] Ibid., 47.
[21] Jahja, *Masalah Tionghoa Di Indonesia*, 132-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat mayoritas. Dalam hal ini masyarakat keturunan Tionghoa dianjurkan untuk memeluk agama penduduk mayoritas (pribumi) yaitu agama Islam.[22] Dengan begitu etnis Tionghoa dapat diterima sepenuhnya olah pribumi karena agama Islam memang mengajarkan persaudaraan tanpa membedakan ras maupun asal usul.[23] Akan tetapi ia juga menyadari bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Menjadi Muslim adalah hidayah, rahmat dan karena karunia Allah SWT.[24]

Sebagai contoh yaitu sikap hidup yang identik dengan Indonesiasi telah dipraktekkan secara nyata oleh H.Abdul Karim Oey. Karim Oey masuk Islam tahun 1926 dan langsung hidup senasib dengan rakyat. Setiap Jumat ia menyatu dengan rakyat di masjid, di bulan Ramadan ia sama-sama puasa dan dihari-hari lainnya mengikuti pengajian-pengajian hingga ia menjadi tokoh Muhammadiyah sampai wafatnya. Menurut Junus, dari hal inilah dapat diketahui bahwa dengan masuk agama Islam secara otomatis berarti telah terjadi pembauran dengan masyarakat pribumi.[25]

Namun demikian, pembauran melalui jalur agama Islam juga tidak sepenuhnya berjalan lancar. Fakta yang terjadi mengapa sebagian orang Tionghoa tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan, dalam hal ini yakni Islam karena disebabkan oleh warisan sejarah di masa lampau oleh penjajah. Kolonialisme secara sistematis telah menanamkan di benak orang-orang Tionghoa gambaran pincang bahwa Islam adalah agama

[22] Jahja, *Islam Di Mata WNI*, 12.
[23] Jahja, *Zaman Harapan*, 21.
[24] Wahono, *70 Tahun Junus*, 22.
[25] Jahja, *Kisah-Kisah Saudara Baru*, 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inferior yang bukan main jeleknya. Bahkan di masa lampau terdapat tekanan dan larangan dari pihak VOC terhadap orang Tionghoa agar tidak memeluk Islam.[26]

Citra buruk mengenai Islam yang dicekoki Belanda memang sudah merupakan *mental block* bagi WNI. Disamping faktor sejarah, banyak WNI yang mempertimbangkan masuk Islam dirintangi pelbagi faktor psikologis misalnya para etnik Tionghoa dari dulu dicap sebagai bunglon yang materialistik dan selalu mencari selamat, menghitung untung rugi. Disamping kekhawatiran tersebut, bagi mereka ada resiko akan terjadi kemunduran keadaan ekonominya bila seorang WNI masuk Islam karena bisa dikucilkan dan diboikot dalam usaha dan bisnis oleh sesama etnis yang menilai kaum muslimin jelek. Hal inilah yang kemudian menyebabkan orang Tionghoa di Jawa kebanyakan memeluk agama di luar Islam sebelum pra-kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, secara perlahan citra dan presepsi tersebut mulai luntur. Banyak kalangan Tionghoa Peranakan yang kemudian memeluk Islam termasuk cendekiawan dan para pengusaha.[27]

C. Usaha-Usaha H. Junus Jahja Demi Tercapainya Asimilasi Etnis Tionghoa Di Jawa (1960-2011)

[26] Jahja, *Islam Di Mata WNI*, 7-8.
[27] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam secara bahasa berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Sedangkan secara definisi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk dan patuh kepada-Nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakuknya.[28] Dari pengertian tersebut, maka terdapat sebagian muallaf yang merasa perlu untuk mendirikan suatu badan yang dapat digunakan sebagai wadah untuk memberikan bantuan kepada muallaf lainya dalam mengajarkan agama Islam. Hal ini perlu dilakukan agar para muallaf yaitu keturunan Tionghoa, tidak lagi menjalankan ritualnya yang terdahulu yang erat bertentangan dengan agama Islam.

Selain itu wadah bagi para muallaf ini diperlukan untuk tempat bernaung, agar mereka dapat dengan mudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi apa yang menjadi larangan-Nya. Untuk mengajarkan secara total ajaran Islam bagi para muallaf keturunan Tionghoa, maka H.Junus Jahja yang merupakan seorang keturunan Tionghoa dan juga sebagai muallaf turut dalam mengembangkan dan mendirikan suatu organisasi seperti Pembina Iman Tauhid Indonesia d/h Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Yayasan Ukhuwah Islamiyah dan Yayasan Haji Abdul Karim Oei.

1. Mengembangkan Pembina Iman Tauhid Indonesia (PITI)d/h Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)

[28] Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Yang Shahih* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2007), 13-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persatuan Islam Indonesia Tionghoa (PITI) merupakan organisasi yang didirikan pada1963.[29] PITI merupakan gabungan antara dua organisasi serupa yang bernama Persatuan Islam Tionghoa (PIT) yang didirikan oleh Yap A Siong di Medan dan Persatuan Tionghoa Muslim (PTM) yang didirikan oleh Kho Goan Tjin di Bengkulu.[30]

PIT didirikan oleh A Yap Siong dan H Abdul karim Oei pada tahun 1953. Pembentukan PIT didasari oleh kesadaran pendirinya, bahwa tidak ada organisasi yang secara khusus menyebarkan agama Islam di kalangan Tionghoa. Hal ini didasari oleh Ketua PP Muhamadiyah. KH Ibrahim yang berpesan kepada A.Karim Oei sebagai berikut

> "Saya minta Oey Tjeng Hien, saya titipkan pada saudara mengahdapi keluarga kita orang-orang Tionghoa itu. Mengapa orang bisa merangkul, kita tidak? Sedang agama kita benar dan hak."[31]

Pernyataan yang dikeluarkan oleh H. Ibrahim itu membekas di benak Karim Oey hingga kemudian ia mengajak Yap A Siong dan Soei Ngo Sek untuk membentuk Persatuan Islam Tionghoa dan segala biaya untuk organisasi ditanggung oleh H Karim Oey. Pada saat itu H.Abdul karim Oey bertindak sebagai ketua. Persatuan Muslim Tionghoa yang didirikan oleh Kho Goan Tjin kemudian mengusulkan

---

[29] Jahja, *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa*, 65.
[30] Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, 81.
[31] Abdul Karim Oey, *Mengabdi Agama, Nusa, dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Karin Oey untuk menyatukan kedua organisasi tersebut. Salah satu alasannya yang dijadikan bahan pertimbangan adalah kedua organisasi tersebut masih bersifat lokal dan tidak mencakup etnis Tionghoa Muslim seluruhnya.

PIT dan PTM akhirnya meleburkan diri menjadi organisasi baru yang dikenal sebagai PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia).[32] Peleburan tersebut merupakan pertanda bahwa masih terdapat sekelompok orang yang peduli dengan kegiatan dakwah di kalangan masyarakat Tionghoa dengan menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Tionghoa di Jawa. Berdirinya PITI oleh berbagai kalangan disambut dengan baik misal seperti M. Najib Subroto. Menurutnya dalam melakukan perkembangan dakwah Islam kepada etnis Tionghoa, jika yang bergerak sama-sama dari kalangan Tioghoa maka dakwah itu akan lebih bagus dan juga lebih mudah untuk mempersatukan.[33]

Organisasi ini memang merupakan organisasi kaum minoritas Tionghoa maka diusahakan posisi yang strategis dipegang oleh etnis Tionghoa. Dengan demikian di dalam organisasi itu telah terjadi pembauran yang diawali dari pengurus-pengurusnya. Melalui cara ini diharapkan akan diperoleh kemudahan untuk melakukan pembauran pada anggota-anggotanya. Dalam perkembangannya PITI semakin mengarah positif, mendapat apresiasi yang cukup menggembirakan

[32] Jahja, *Islam Di Mata WNI*, 34.
[33] Media Sinergi "Tidak Ada Perbedaan Suku Dalam Islam" Dalam Sinergi, Edisi Ke-27/Tahun III/15 Januari -15 Februari,2001, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana banyak masyarakat yang mendukung organisasi ini sebagai salah satu wadah asimilasi. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya pejabat sipil dan militer yang ditempatkan sebagai pembimbing dan penasehat organisasi. Masuknya orang-orang dari Angkatan Darat ke dalam tubuh PITI, merupakan salah satu misi pemerintah untuk mendukung setiap organisasi yang mendukung proses asimilasi di masyarakat sebagai pemecah permasalahan Tionghoa di Jawa.

Di tahun 1965, setelah terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, PITI semakin tergerak untuk menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa. PITI merasa perlu adanya langkah untuk menerbitkan Al-Qur'an dalam aksara Cina, dengan tujuan agar orang Tionghoa Totok yang telah memeluk Islam dapat mempelajari Al-Quran dengan mudah. Hal ini merupakan strategi yang dibuat oleh PITI khusus untuk etnis Tionghoa yang masih berbahasa Cina sebagai bahasa sehari-hari sehingga mempermudah penyabaran dakwah di kalangan tersebut. Pada 10 April 1972 PITI meminta izin kepada menteri Agama H. A.Mukti Ali untuk mengeluarkan Al-Qur'an dan majalah dakwah menggunakan bahasa Cina. akan tetapi permohonan ini ditolak karena untuk meniadakan tendensi eksklusivisme warga Negara Indonesia keturuan asing serta mempercepat berjalannya asimilasi nasional sehingga tercipta kestabilan sosial di masyarakat.[34]

[34] Karim Oey, *Mengabdi Agama*, 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PITI pada masa itu memang dianggap sebagai salah satu organisasi yang dinilai dapat memepercepat proses asimilasi dengan cara menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa terutama masa-masa setelah peristiwa G 30 S/PKI. PITI yang memfokuskan untuk menyebarkan dakwah di kalangan etnis Tionghoa, tampaknya mulai terhalang karena penggunaan nama Tionghoa di organisasinya. Pada tahun 5 Desember 1972 PITI membubarkan diri.[35] Kemudian di tahun yang sama 15 Desember 1972 pula PITI yang awalnya singkatan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia dirombak menjadi Pembina Iman Tauhid Indonesia (PITI) lewat musyawarah di masjid Istiqlal Jakarta. [36]

Perubahan nama organisasi ini bukannya tidak membawa persoalan. Selain himbauan dari Kejaksaan Agung kepada PITI untuk tidak lagi mempergunakan kata Tionghoa di organisasinya karena penggunaan Tionghoa dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat juga menurut H.Karim Oei penggunaan Tionghoa bagi organisasi dakwah sejak semula didirikan sudah ada yang menentang seperti Dr.Lie Kiat Teng (bekas menteri Kesehatan tahun 1950-an) misalnya, ia lebih menyukai nama yang umum karena pencantuman kata Tionghoa bisa memberi kesan eksklusivisme.[37]

Menurut Junus, dengan berubahnya nama PITI menjadi Pembina Iman Tauhid Indonesia dimaksudkan untuk menyelaraskan

[35] Jahja, *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa*, 65.
[36] Ibid., 65.
[37] Budiman, *Masyarakat Islam Tionghoa*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jiwa dari perundang-undangan yang berlaku, dimana diharapkan PITI bisa menjadi organisasi masyarakat yang selain berkecimpung di bidang dakwah, juga ikut serta membantu pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional melalui asimilasi. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk menggalakkan pembauran kembali yang tertuang dalam TAP MPR IV/1978 BAB IV/D sebagai berikut [38]

> "Usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa"

Untuk mengembangkan PITI ke berbagai daerah di Indonesia khusunya Jawa, maka PITI mendirikan cabang di tiap-tiap daerah. Jika ada daerah yang menginginkan untuk mendirikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PITI, maka diharapkan daerah tersebut sudah memiliki dua cabang terlebih dahulu. PITI memiliki fungsi utama sebagai "laboratorium dakwah" atau Islamic Reaserch Center" yang spesialisasinya dan objek studinya adalah masyarakat keturunan Tionghoa.[39]

Menurut Junus, PITI merupakan wadah bagi mualaf yang masih dalam taraf awal ingin belajar mengenai Islam bersama-sama kawan yang senasib, yang baru memeluk agama Islam.[40] Selain itu PITI juga merupakan tempat bagi para muallaf untuk mendapatkan

[38]Junus Jahja, *Garis Rasial Dan Garis Usang Lika Liku Pembauran* (Jakarta: BAKOM-PKB, 1983), 42.
[39] Jahja, *Kisah-Kisah Saudara Baru,* 1989.
[40] Ibid., 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan sementara, karena dikucilkan oleh keluarganya.[41] Kegiatan yang dilakukan oleh PITI dalam membina keislaman para anggotanya adalah dengan mengadakan pengajian, kursus, pertemuan-pertemuan, tabligh akbar, kunjungan kekeluargaaan atau silahturahmi dan juga menyelenggarakan pelatihan tata cara ibadah sesuai sunnah Rasul. Bersama lembaga-lembaga dakwah yang sudah mapan dan mempunyai jaringan luas seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama', Al-Irsyad, Himpunan Mahasiswa Islam, Majelis-Majelis Taklim dan lain sebagainya. [42]

Junus Jahja masuk Islam pada tahun 1979 kemudian di tahun 1980 beliau melaksanakan ibadah haji. Beliau aktif sebagai aktivis PITI dan juga masuk keanggotaannya. Di setiap pertemuan-pertemuan atau acara yang dilaksanakan oleh PITI Junus selalu hadir. Menurut Junus asimilasi adalah suatu obsesi dan salah satu cara yang ia gunakan adalah melalui dakwah bersama PITI. Dalam perkembangannya, jumlah keturunan Tionghoa yang masuk Islam semakin meningkat. Selain masuk Islam di bawah naungan PITI, masyarakat Tionghoa yang masuk Islam kini menurut Junus kebanyakan melalui jalur-jalur biasa yaitu berikrar di masjid, majelis-majelis taklim KUA (Kantor Urusan Agama) dan sebagainya.[43] Keturunan Tionghoa nampaknya sudah semakin terbiasa langsung melangkah ke lembaga-lembaga dan tidak ragu-ragu lagi. Proses ini

[41] Ibid., 85.
[42] Jahja, *Catatan Seorang WNI*, 39.
[43] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Junus akan terus berkembang hingga dakwah di kalangan masyarakat keturunan Tionghoa akhirnya terintegrasikan secara sempurna menjadi kegiatan dan tanggungjawab umat secara menyeluruh.[44] Dengan demikian meningkatlah efisiensi dan efektivitas dakwah di kalangan keturunan Tionghoa.

2. Mendirikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah

Yayasan Ukhuwah Islamiyah didirikan pada 16 Oktober 1981. Tujuan dari didirikannya lembaga ini adalah untuk melaksanakan dakwah Islamiyah di kalangan keturunan Tionghoa khususnya kaum intelektual, wiraswasta, dan angkatan muda. Dengan harapan jika ketiga lapisan tersebut memeluk Islam maka yang lainnya akan menyusul dengan sendirinya.[45] Yayasan ini didirikan oleh Junus Jahja bersama Drs.H Khozyn Arief, Drs.M.Bidiyatna, Hambas dan H.Sudrajat Brotokuntjoro. Pendirinya terdiri dari 2 non pri dan 3 pri. Yayasan ini disebutkan oleh Junus sebagai organisasi yang bukan sebagai organisasi massa. Karenanya tidak mengenal keanggotaan dan sebagainya. Meskipun baru didirikan tetapi banyak dari kalangan Tionghoa yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh Junus bersama pendiri lainnya sehingga lambat laun dirasakan Junus terdapat semacam keluarga besar Ukhuwah Islamiyah.[46]

---

[44] Jahja, *Islam Di Mata WNI*, 41.
[45] Tim Yayasan Ukhuwah Islamiyah, *Masalah Tionghoa dan Ukhuwah Islamiyah* (Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 15.
[46] Jahja, *Muslim Tionghoa*, 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dua tahun usianya, yayasan ini telah berhasil melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian seperti membantu pengislaman beberapa orang dari keturunan Tionghoa. Misalnya, di tahun 1982 telah masuk Islam seorang sarjana akuntan Tan Pendi Konstan. Banyak pemuda/pemudi keturunan Tionghoa dari berbagai kalangan baik pelajar, mahasiswa, cendekiawan maupun sarjana mulai merasakan nikmatnya menjadi muslim. Dalam hal ini, Yayasan Ukhuwah islamiyah mendapat tugas yang bertambah berat untuk melayani dan membimbing mereka, namun sebagai tugas suci dan mulia, maka harus mendapatkan penanganan yang wajar dan baik.[47] Dalam dakwahnya melalui yayasan ini, Junus sering mendatangkan mubaligh dari keturunan Tionghoa. Hal ini diekspos secara besar-besaran melalui media massa agar khalayak ramai khususnya Tionghoa di Indonesia mengethaui bahwa ada perkembangan pesat dalam dakwah Islamiyah di kalangan sesama keturunan.

Menurut Junus jahja, keturunan Tionghoa yang masuk Islam semakin meningkat, selain di Jakarta, juga di Jawa Barat, Jawa Tengah termasuk Semarang, dan Jawa Timur. Hal ini merupakan sesuatu dan menggembirakan dalam usaha membantu program Pemerintah mempercepat proses pembauran dan asimilasi. [48] Yayasan Ukhuwah Islamiyah juga menerbitkan beberapa buku, brosur dan selebaran-selebaran lainnya yang berisikan data-data baru mengenai mengalirnya

[47] Jahja, *Zaman Harapan*, 201-202.
[48] Ibid., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan Tionghoa ke agama Islam. Ada penerbitan-penerbitan yang dijual melalui toko-toko buku dan ada pula yang disebarkan secara cuma-cuma. Dan setiap hari raya Islam, para pengurus yayasan ini memanfaatkannya dengan melakukan kegiatan yang mempertemukan kaum Muslim dengan masyarakat Tionghoa. Sehingga pada kesempatan-kesempatan itu selalu ada yang masuk Islam.[49]

Pada suatu pertemuan di Yayasan Ukhuwah Islamiyah beberapa tokoh dan intelektual Muslim berpendapat bahwa harus ada suatu keseimbangan antara dunia akhirat. Kemudian agar disetiap pertemuan tidak hanya berdiskusi saja tanpa tindak lanjut yang nyata maka diambil kesimpulan untuk mengadakan semacam Bussines Club yang bernafas Islam. Dengan mencoba menghimpun pengusaha-pengusaha Islam agar bertemu secara periodik. Dengan demikian diharapkan timbul kesetiakawanan dan kollegialistik yang dapat dijadikan landasan untuk memulai meningkatkan daya ekonomi secara bertahap.[50]

Di akhir tahun 1983 diadakan kembali suatu pertemuan di salah satu restoran Gedung Dewan Pers Jakarta. Pertemuan ini dihadiri beberapa pengusaha sukses yang menguaraikan kisah dan jerih payah mereka ketika terjun dalam dunia perdagangan. Kemudian di tahun berikutnya diadakan pertemuan kembali di Hotel Borobudur Intercontinental Jakarta. Minat untuk bersilahturahmi antara sesama

[49] Ibid., 11.
[50] Jahja, *Muslim Tioghoa*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha Muslim ternyata cukup besar. Seperti H Masagung, H.Moh Amid, H.Tanri Abeng, H.Sutanto, H.Firdaus, H.Bambang Suyanto dan ada pula yang datang dari luar Jakarta. Pada saat itulah kemudian dibentuk Kontak Bisnis Ukhuwah Islamiyah di bawah pimpinan H.Gozali Katianda. Melihat animo yang cukup besar maka dapat diperkirakan bahwa Bussines Club ini akan berkembang. Bagi Junus dkk, persoalan pokok tersisi dihadapi selanjutnya ialah mengembangkan secara praktis Ukhuwah Islamiyah antar anggota dan membuktikan bahwa Bussines Club sungguh menguntungkan. Baik untuk usaha pribadi masing-masing maupun dalam rangka meningkatkan daya ekonomi umat Islam khususnya dan bagi kesejahteraan bangsa pada umumnya.[51]

3. Mendirikan Yayasan H. Abdul karim Oei

Untuk merespon dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru tentang pembauran antar masyarakat etnis Tionghoa dan pribumi maka pada tanggal 9 April 1991 didirikan Yayasan Haji Abdul Karim Oei. Pengaggas berdirinya yayasan ini adalah H.Junus Jahja.[52] Dengan tujuan utama didirikan untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dan sebagai pusat informasi Islam khusunya ke kalangan etnis Tionghoa. Nama Yayasan ini diambil dari nama seorang tokoh keturunan Tionghoa yang diikenal sebagai perintis

[51] Ibid., 33.
[52] Kompas, Selasa, 8 November 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwah Islam di kalangan etnis Tionghoa dan juga pernah menjadi konsul Muhammadiyah di Bengkulu. Ia adalah Haji Abdul Karim Oey. Karim Oei meninggal pada 1988 diusia ke-83 tahun.

Menurut Junus Jahja, Karim Oei merupakan Muslim yang taat, bisnismen yang sukses dan nasionalis sejati. Ia seorang perintis Islam dikalangan etnik Tionghoa sejak sebelum perang Dunia kedua. Beliau seorang pejuang kemerdekaan yang bersahabat dengan Bung Karno. Yayasan ini juga sebagai tanda penghormatan serta untuk mengenang sosok Karim Oei dengan segala kontribusinya kepada Negara.[53] Selain itu dengan didirikannya yayasan ini meraka ingin kembali meneruskan kiprah yang telah dilakukan oleh H.Karim Oei semasa hidupnya, dan berharap akan muncul Karim Oei-Karim Oei berikutnya.

Dalam pembentukan Yayasan H.Karim Oei, para penggagasnya seperti Junus Jahja bekerjasama dengan organisasi Islam antara lain Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Al-Wasliyah, Korps Alumni Himpunan mahasiswa Islam, ICMI dan Muslim keturunan Cina.[54] Pada dasarnya visi dari Yayasan ini adalah untuk mewujudkan pembauran antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi. Visi tersebut bertolak dari kesenjangan antara etnis Tionghoa yang sudah berlangsung sangat lama yang disebabkan oleh bebagai faktor.

[53] Jahja, *Muslim Tionghoa*, 69.
[54] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana organisasi atau Yayasan-yayasan pada umumnya, Yayasan ini memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut:[55]

Dewan Pembina:

Ketua : Prof.Dr.Sri Edi Swasono

Sekretaris : Drs H Junus Jahja

Anggota-anggota

1. K.H Ali Yafi
2. H.Sofyan Tandjoeng
3. H. Yunan Helmi Nasution, SH
4. Drs.H.fahmi Idris
5. H.M.D.Rachman
6. H. Mohammad Amid

Badan Pengurus:

Ketua Umum : Drs.H.Lukman Harun

Wakil Ketua Umum : H.M.Ali Karim

Ketua I : Drs. Fairus Lubis

Ketua II : H. Ahmad Gozali Katianda

Ketua III : H.Endang Suhendi

Sekretaris Umum : Bambang Wiwoho

Sekretaris I : M.Ridwan Lubis

Skretaris : .R. Sudrajat Brotokuntjoro

Bendahara Umum : H. Azoel Haroen

Bendahara I : H. Suria

Bendahara II : H.M. Syarief Tanujaya

Kantor Yayasan H.Karim Oei pada saat didirikan awalnya memang masih menyewa sebuah ruko bertingkat empat di Jalan Lautze

[55] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

no 89 Pasar Baru Jakarta. Kegiatan Yayasan H.Karim Oei sedikit demi sedikit mulai dilakukan dan sehari-hari dipimpin oleh Junus Jahja. Selang beberapa waktu Jalan Lautze mulai berfungsi sebagai Islamic Centre.[56] Pusat Informasi Islam untuk WNI (Islamic Centre for ethnic Chinese) ini yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Islam secara lisan maupun tulisan. Tempanya secara khusus ditentukan di daerah Pecinan (China-Town) dengan lantai bawah seluas 90 m2 ini digunakan untuk macam-macam kegiatan. Lantai bawah dijadikan masjid dimana setiap jumat dilaksanakan sholat berjama'ah bagi umat sekitarnya. Lantai lain di atas dipakai untuk Islamic Information Centre dan kegiatan lainnya.[57]

Kemudian pemilik lahan jalan Lautze ini menawarkan bangunan tersebut untuk dibeli oleh Yayasan H.Karim Oei dengan harga Rp 200 juta. Dalam waktu enam bulan jika bangunan tersebut tidak dibeli maka pemilik lahan memintanya untuk meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja Junus bersama pendiri lainnya kebigungan karena tidak memiliki dana yang cukup. Setelah diadakan rapat seluruh anggota Yayasan, Junus bersama anggota lainnya mencoba menghubungi beberapa pihak termasuk Menteri Agama RI, Munawir Sjadzali yang kemudian memberikan dana sebanyak 25 juta kepada yayasan ini.

[56] Ibid., 127.
[57] Jahja, *Islam Di Mata WNI*, 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggal 19 September 1992, Junus membuat surat kepada Presiden Soeharto dan Ketua Umum ICMI, Prof.Dr.Ing.B.J.Habibie. di luar dugaan Junus ternyata Pak Habibie memberi perhatian yang sangat serius atas surat tersebut. Melalui Yayasan Abdi Bangsa yang didirikan oleh ICMI, beliau menugaskan untuk membeli gedung tersebut. Akhirnya pada 16 Desember terjadi jual beli bangunan tersebut. Yayasan Abdi Bangsa menyerahkan pengelolaan bangunan kepada Yayasan H. Karim Oey. Di tanggal 4 Februari 1994 diresmikan pemakaian gedung Yayasan H.Karim Oei yang sekaligus Masjid Lautze oleh Prof.Dr. Ing.B.J.Habibie.[58]

Di samping kesibukan yang murni Islami seperti pengajian-pengajian untuk kaum ibu dan remaja, Yayasan Karim Oei juga menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris dan matematika bagi generasi muda semua agama. Bahkan disalurkan sejumlah beasiswa kepada anak didik SD/SMP yang 50% Muslim dan 50% non-muslim. Dengan demikaian masyarakat sekelilingnya yang kebanyakan etnik Tionghoa merasakan bahwa Islam betul-betul "rahmatan lil alamin" rahmat untuk siapa saja termasuk bagi WNI.

Dengan adanya sholat Jum'at dipersil Lautze yang juga berlokasi sama dengan yayasan ini dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam bulan ramadhan, Pusat Informasi Islam untuk WNI ini menjadi terkenal. Para WNI yang telah mengucapkan Ikrar Dua Kalimat

[58] Wahono, *70 Tahun*, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syahadat, dididik untuk belajar sholat dan ayat-ayat Al-Qur'an di masjid maupun di Yayasan ini hingga secepatnya bisa melakukan ibadah dengan baik dan tertib antara lain ikut Jum'atan. Pada tahap berikutnya mereka dididik untuk mengimami sholat yang penting sekali dalam membina keluarga.[59]

Banyak pula anak-anak muda yang masuk Islam dan tidak disetujui oleh orang tua mereka. Tidak sedikit dari mereka yang diusir oleh keluarganya. Karena hal ini mereka kemudian datang ke Masjid Lautze. Yayasan H.Karim Oei mencoba menampung meraka dan mencarikan bapak angkat dan yang wanita ditempatkan di asrama khusus. Ada diantara anak-anak tersebut yang dimasukkan ke pesantren bahkan ada pula yang dikirim sekolah ke Universitas Islam Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia.[60]

Di Yayasan ini, bagi yang menginginkan, juga diadakan kursus mubaligh. Para WNI yang baru masuk Islam merasa tidak canggung, dimana mereka bisa bertemu baik dengan Muslim yang sejak lahir maupun teman senasib yang baru memeluk Islam. Dalam lingkungan semacam ini, mereka tidak terlalu malu membuat kekeliruan dalam mengucapkan ayat dan kalimat dalam bahasa Arab atau khawatir ditertawakan dan sebagainya. Faktor psikologis ini ternyata cukup penting bagi mereka yang masih membutuhkan lingkungan penyesuaian untuk beberapa waktu. Bagi WNI yang belum Muslim,

[59] Jahja, *Islam Di Mata WNI*, 149.
[60] Wahono, *70 Tahun Junus*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proyek rintisan Islam masuk pecinan dengan kantornya di jalan Lautze ini sangat parktis. Nama Karim Oey membuat mereka tidak ragu-ragu untuk berkunjung dan menanyakan mengenai Islam.[61]

Ini dipandang Junus sebagai jalan untuk pembauran dan penyelesaian mengenai masalah keturunan, suatu proses asimilasi sosial, kebudayaan dan agama, terutama di *grassroot* (akar rumput) dengan harapan orang nonpri Islam akan diterima sepenuhnya oleh rakyat sehingga tidak ada diskriminasi, hilang prasangka dan umat Islam nonpri diterima sebagai orang kita (*in-group*). [62]

[61] Jahja, *Islam Di Mata WNI*, 150.
[62] Wahono, *70 Tahun Junus Jahja*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lauw Chuan Tho atau biasa dikenal dengan H. Junus Jahja lahir di Jatinegara, Jakarta pada 22 April 1927. Junus merupakan lulusan dari Universitas *Nederlandse Economische Hogeschool* (NEH) Rotterdam Belanda. . Ia memiliki karir yang begitu bagus. Selain bekerja pada Bank ia juga aktif di berbagai organisasi atau lembaga pembauran. Junus juga sebagai anggota MUI (Majelis Ulama' Indonesia), anggota Dewan Pertimbangan Agung, pengurus ICMI dan sebagainya. Ayahnya bernama Lau Lok Soei dan Ibunya bernama Oei Ay Nio. Ia memeluk agama Islam pada tanggal 23 Jui 1979 dan menunaikan ibadah haji pada 10 Oktober 1980. Pada hari senin 7 November 2011, Junus menghembuskan nafas terakhirnya akibat menderita sesak nafas.
2. Asimilasi dicetuskan pertama oleh Partai Tionghoa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka Pemerintah menerapkan kebijakan - kebijakan untuk mempercepat proses asimilasi di kalangan etnis Tionghoa seperti Kebijakan tentang Dwi Kewarganegaraan, kebijakan mengenai perubahan nama akan tetapi kebijakan ini baru aktual ketika pemerintahan Orde baru. Tahun 1963 didirikan beberapa lembaga pembauran seperti Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB). Lembaga ini berdiri dengan tujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebarkan ide dan metode asimilasi. Setelah pemerintahan Presiden Soekarno berakhir dan diganti oleh pemerintah Orde baru, LPKB dibubarkan kemudian pemerintah membentuk Badan Komunikasi (BAKOM) bertugas menekankan asimilasi total.

3. Usaha-Usaha H. Junus Jahja demi tercapainya asimilasi etnis Tionghoa di Jawa yaitu *pertama*, mengembangkan Pembina Iman Tauhid Indonesia (PITI)d/h Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). PITI didirikan pada 1963 yang diketuai oleh H.Abdul Karim Oey. Organisasi ini sebagai salah satu wadah asimilasi bagi keturunan Tionghoa dan juga sebagai wadah bagi para muallaf yang masih dalam taraf awal ingin mempelajari Islam bersama dengan kawan senasibnya yang baru memeluk Islam. *Kedua yaitu* mendirikan Yayasan Ukhuwah Islamiyah pada tahun 1981 dengan tujuan untuk melaksanakan dakwah Islamiyah di kalangan keturunan Tionghoa , khususnya kaum intelektual, wiraswasta, dan angkatan muda. *Ketiga* yaitu mendirikan Yayasan Haji Abdul Karim Oei di tahun 1991 dengan tujuan untuk meningkatkan dakwah Islamiyah dan sebagai pusat informasi bagi masyarakat Tionghoa yang ingin mengetahui tentang agama Islam dan untuk mennghormati serta mengenak sosok H. Abdul Karim Oey.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa skripsi yang dipersembahkan ini masaih jauh dari kesempurnaan. Lebih lanjut penulis berharap ada kritik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saran yang membangun demi kesempurnaan karya-karya ilmiah berikutnya serta adanya tindak lanjut dari penelitian ini. Penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini yang sangat singkat dapat dijadikan renungan bagi semua kalangan untuk melakukan untuk melakukan rekontruksi atas kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afif, Afthonul. *Identitas Tionghoa Muslim di Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*. Depok: Kepik, 2012.

Abdurahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacanaa Ilmu, 1999.

Budiman, Amen. *Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia*. Semarang: Tanjung Sari, 1979.

Burke, Peter. *Sejarah Dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Coppel, Charles A. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Departemen Dalam Negeri. *Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Kewarganegaraan, Asimilasi dan Orang Asing*, 1978.

Departemen Penerangan R.I. *Asimilasi Dalam Rangka Pembinan Kesatuan Bangsa*, 1964.

Hugiono dan Poerwantana. *Pengantar Ilmu Sejarah.* Jakarta: Rineka Cipta, 1987.

Jahja, H Junus. *Muslim Tionghoa.* Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islam, 1985.

_____ . *Islam di Mata WNI.* Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islam, 1995.

_____ . *Catatan Seorang WNI: Kenangan, Renungan dan Harapan.* Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1988.

_____ . *Ganti Nama.* Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1987.

_____ . *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tiongkok: Rekaman Dakwah Islamiyah 1979-1984.* Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah, 1984.

_____ . *Masalah Tionghoa Indonesia: Asimilasi Versus Interga* Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran, 1999.

_____ . *Acong Kemana….?*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran. 1999.

_____ . *Kisah-Kisah Saudara Baru*. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah. 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____ . *Non-Pri Di Mata Pribumi*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1991.

_____ . *Peranakan Idealis: Dari Lie Eng Hok sampai Teguh Karya.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003.

_____ . *Garis Rasial Dan Garis Usang Lika Liku Pembauran.* Jakarta: BAKOM-PKB, 1983.

_____. *Pri-Nonpri Dan Konvensi Cina Sedunia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran. 1981.

Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. *Prinsip Dasar Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Yang Shahih*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2007.

Karim, Abdul, *Mengabdi Agama, Nusa, dan Bangsa: Sahabat Karib Bung Karno*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Kartidirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

_____. *Pergerakan Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan dari Kolonial sampai Nasional Jilid 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Kasdi, Aminudin. *Pengantar Dalam Studi Sejarah Suatu*, Surabaya: IKIP, 1995.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Setiono, Benny G. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Trans Media Pustaka, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Suryadinata, Leo. *Kebudayaan Munoritas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1988.

_____ . *Negara Dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia.* Jakarta: LP 2002.

_____ . *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa.* Jakarta: LP3ES, 1999.

_____ . *Dilema Minoritas*. Jakarta: PT. Grafiti Press, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setyautama, Sam. *Tokoh-Tokoh Etnis Tionghoa Di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.

Suhandinata, Justian. *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia* .Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Tan, Mely G. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa.* Jakarta: PT Gramedia, 1979.

Taher, Tarmizi. *Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa Di Indonesia.* Jakarta: PPIM, 1997.

Panitia Penyuluhan Asimilasi. *Lahirnya Konsepsi Asimilasi: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa, 1977.

Tim Yayasan Rahmat Semesta. *Dakwah dan Asimilasi: Lahirnya Seorang Muslim dan Aneka Sambutan*. Jakarta: Yayasan Rahmat Semesta, 1979.

Wahono, Riyanto. *70 Tahun Junus Jahja: Pribumi Kuat Kunci Pembauran*. Jakarta: Bina Rena Pariwara. 1997.

Surat Kabar dan Majalah

Kompas. Selasa 8 November 2011.

Media Sinergi. Edisi Ke-20/Tahun II/Juni, 2000.

Media Sinergi. Edisi Ke-27/Tahun III/15 Januari -15 Februari, 2001.

Star Weekly. No.739- 27 Februari 1960.

Star Weekly. No. 786-21 Djan 1961.

Internet dan Jurnal

Nurda, Siska Yulia "Peranan KH Abdurrahman Wahid Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa Di Indonesia", dalam http://repository.unej.ac.id, 2014.

Rahmat, Dudung "Hakikat Pendidikan" Dalam http://www.google.co.id/url?q=http:// file.upi.edu/Direktori/FPBS (Diakses pada 2 Desember 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rafika, Fahmi "Integrasi Sosial Muslim Tionghoa", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Volume 9, No. 2*, Juli 2015.

Setianingsih, Dwi As "Junus Jahja dan Semangat Pembauran" Dalam http:Koran.kompas.com/read/xml/2009/08/20/03563569.junus.jahja.dan.
semangat.pembauran (Diakses pada 7 Desember 2017).

http://www.tionghoa.infi/kristoforus-sindhunata/ diaskes pada 10 Desember 2017

http://kbbi.co.id diaskes pada 8 Desember 2017.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id